LAPORAN KINERJA | 2020

Direktorat SITP

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala rahmat, dan hidayah-Nya, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan mampu melewati tahun 2020 dengan baik walaupun ditengah kondisi dan tantangan pandemi global yang saat ini dihadapi. Berkat kemurahan-Nya pula, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat SITP Tahun 2020 ini secara tepat waktu.

Penyusunan LAKIN merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini berisi capaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah dengan tujuan agar dapat mengetahui hasil/output atas pelaksanaan program dan kegiatan beserta langkah-langkah yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan melakukan penyusunan LAKIN berarti Direktorat SITP juga mengimplementasikan adanya akuntabilitas di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung terwujudnya good governance serta sebagai implementasi transparansi dan alat kendali yang menjadi trigger dalam upaya peningkatan kinerja.

Laporan ini diolah berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat SITP sebagaimana termuat dalam Kontrak Kinerja tahun 2020 antara Direktur SITP dan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Secara umum, pencapaian kinerja Direktorat SITP di Tahun 2020 dapat dikatakan berhasil dalam menyelesaikan kontrak kinerjanya, di mana seluruh IKU berhasil dicapai targetnya dan beberapa IKU mampu melampaui target yang ditetapkan.

Dalam kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak terutama para pegawai Direktorat SITP yang telah bekerja keras dan berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan capaian kinerja Direktorat SITP pada tahun 2020. Diharapkan capaian kinerja tahun 2020 tidak membuat cepat berpuas diri, namun, dengan segala komitmen, partisipasi, dan dukungan aktif dari seluruh pegawai Direktorat SITP, dapat memacu ke arah kemajuan kinerja yang lebih baik di tahun 2021.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Jakarta, tanggal 02 Februari 2021
Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Ditandatangani secara elektronik
Saiful Islam

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan rencana strategis Dit. SITP berupa visi, misi, dan tujuan strategisnya, dengan berpedoman kepada Renstra DJPb tahun 2020 – 2024, Dit. SITP telah menyusun Peta Strategi Kemenkeu-*Two* Dit. SITP tahun 2020. Peta Strategi tersebut menjabarkan dan merinci pencapaian atas rencana strategis Dit. SITP tersebut. Penjabaran tersebut dituangkan ke dalam 13 (tiga belas) sasaran strategis, yang pencapaiannya diukur menggunakan 18 (delapan belas) indikator kinerja utama (IKU), yang periode pencapaiannya dirinci melalui *trajectory*.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada akhir periode Triwulan IV tahun 2020, dari 18 target IKU yang ditetapkan pada awal tahun 2020, seluruhnya telah berhasil mencapai targetnya. Beberapa indikator kinerja bahkan menunjukkan hasil yang mampu melampaui target yang ditetapkan. Dengan hasil capaian kinerja ini, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada akhir periode triwulan IV 2020 sebesar 107,65. Hasil ini menunjukkan tingginya komitmen, partisipasi dan kerja keras dari pimpinan beserta seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkup Dit. SITP dalam mendukung implementasi rencana strategis Dit. SITP serta pencapaian pemenuhan target yang telah ditetapkan.

Di samping itu, pencapaian atas seluruh target indikator kinerja tersebut, tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari unit-unit eksternal Dit. SITP, baik itu unit vertikal DJPb yaitu : KPPN dan Kanwil DJPb, yang turut serta ikut berpartisipasi secara langsung dalam pencapaian IKU Tingkat Implementasi SAKTI dan IKU Indeks kepuasan publik atas layanan Dit. SITP; maupun Pusintek, yang membantu terlaksananaya IKU Indeks keberhasilan *switchover* sistem TIK pada DC/DRC, untuk aplikasi-aplikasi kritikal DJPb : SPAN, OMSPAN, SAKTI, eRekon & LK dan MPN-G3, serta atas dukungan pencapaian IKU Indeks Pengelolaan Sistem TIK yang terkait Tingkat *Downtime* sistem TIK, melalui pemeliharaan infrastruktur di DC/DRC.

Namun demikian, di dalam usaha untuk pencapaian target-target kinerja tersebut, Dit. SITP tidak terlepas dari tantangan, rintangan dan hambatan, terutama dalam implementasi SAKTI *Web* pada tahun 2020, diantaranya :

1. Timbulnya wabah COVID-19 yang berubah menjadi pandemi global sejak awal tahun 2020, dan berdampak terhadap pola kerja DJPb dan pencapaian beberapa target kinerja Dit. SITP mulai akhir periode Triwulan I 2020 sampai dengan akhit tahun 2020.
2. Terdapat perubahan strategi implementasi SAKTI pada pertengahan tahun 2020, yang semula ruang lingkup implementasinya adalah Rollout SAKTI Web, dirubah menjadi Piloting SAKTI Web (*Full Module*) Tahap V, dengan tujuan untuk memperluas implementasi Aplikasi Sakti *Web Full Module* oleh pengguna dari K/L baru, yaitu satker-satker dari Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan DPR. Akibat perubahan rencana tersebut, berdampak terhadap 2 (dua) *milestone* kegiatan yang semula akan dilaksanakan di tahun 2020, yaitu : ToT/ EUT Rollout SAKTI, dan Penyusunan Rancangan PMK Implementasi Rollout SAKTI, yang ditunda ke tahun 2021.
3. Implementasi protokol kesehatan terkait pembatasan kegiatan yang melibatkan orang dalam jumlah banyak, serta pola kerja *Work From Home*/ W*ork From Office* (WFH/WFO) di lingkungan institusi pemerintah, termasuk Dit. SITP, berdampak terhadap metode penyelenggaraan *training*/ pelatihan untuk SAKTI, yang semula dilaksanakan secara *offline* (metode *classroom*), dirubah menjadi o*nline (*metode *video conference* dan *self-learning* melalui *video tutorial*). Kesulitan pelaksanaan *training online* ini dialami terutama oleh satker-satker K/L pengguna pertama kali SAKTI *Web,* yang masih memerlukan pendampingan secara intensif melalui training *offline* oleh

para *trainer* SAKTI.

4. Belum siapnya SDM satker K/L dan belum meratanya infrastruktur jaringan di masing-masing lokasi/wilayah satker yang akan mengimplementasikan SAKTI *Web*, sebagaimana yang tertuang dalam hasil Survei *Change Readiness* SAKTI tahun 2020.
5. Dit. SITP selaku penyelenggara persiapan dan operasional Piloting SAKTI sejak tahun 2011 s.d. saat ini, mengalami keterbatasan dalam jumlah *resources*. Dari jumlah total pegawai Dit. SITP sekitar 199 orang, kurang lebih hanya sekitar 70 orang yang terlibat langsung dalam mengawal implementasi SAKTI kepada sekitar 23.000 satker K/L, mulai dari penyusunan kebijakan, pengembangan sistem, narasumber training, pendamping satker K/L, penyedia layanan pengguna, operasional sistem, hingga penyusunan rencana pengadaan dan pengelolaan infrastruktur.

Selanjutnya pada tahun 2020, Dit. SITP juga mendapatkan penghargaan atas kinerja lainnya, diantaranya : Capaian HAI-DJPb pada Lomba *The Best Contact Center Indonesia 2020* dan Lomba *Top Ranking Permormers Awards* 2020 tingkat Asia Pasifik; Penghargaan untuk Direktur SITP Saiful Islam sebagai salah satu *Top Leader on Digital Implementation* 2020; dan, Penghargaan kepada Ditjen Perbendaharaan dalam *Top Digital Implementation 2020 on Institution Sector* dengan *Level Stars* 4, dari Majalah *It Works*.

Dit. SITP senantiasa berinovasi serta meningkatkan partisipasinya secara aktif dalam menunaikan amanah reformasi keuangan negara, yaitu melalui penyediakan sistem informasi keuangan negara dan teknologi perbendaharaan yang handal untuk lingkungan DJPb, Kemenkeu, Kementerian/Lembaga, serta masyarakat umum lainnya yang berkepentingan.

DAFTAR ISI

		Halaman
Halaman Judul	.....	1
Kata Pengantar	.....	2
Ringkasan Eksekutif	.....	3
Daftar Isi	.....	5
BAB I PENDAHULUAN	.....	6
A. Latar Belakang	.....	6
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	.....	6
C. Peran Strategis	.....	8
D. Sistematika Laporan	.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	.....	11
A. Rencana Strategis	.....	11
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	.....	16
A. Capaian Kinerja Direktorat SITP	.....	16
B. Realisasi Anggaran	.....	37
C. Kinerja Lainnya	.....	37
BAB IV PENUTUP	.....	42
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap instansi pemerintah termasuk Dit. SITP, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan DJPb dan Kemenkeu, diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dicapai pada tahun tersebut.

Tujuan dari pelaporan kinerja tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja (LAKIN) Dit. SITP tahun 2020 disusun berdasarkan capaian kinerja, baik kinerja utama maupun kinerja lainnya, yang telah dilakukan di Dit. SITP sepanjang tahun 2020. Kinerja utama mengacu pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Dit. SITP tahun 2020, yang ditandatangani oleh Direktur SITP dengan Dirjen Perbendaharaan pada tanggal 31 Januari 2020. Sementara itu, kinerja lainnya mengacu pada kinerja non IKU Dit. SITP yang menunjukkan prestasi dan penghargaan yang diperoleh Dit. SITP pada tahun 2020. LAKIN Dit. SITP tahun 2020 juga berisi capaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dit. SITP, dengan tujuan untuk mengetahui hasil/output atas pelaksanaan program dan kegiatan Dit. SITP beserta langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (Dit. SITP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 206/PMK.1/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan jo. PMK 234/PMK.01/2015 tentang Perubahan PMK 206/PMK.01/2014, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kajian dan standarisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.

Struktur organisasi Dit. SITP terdiri atas : 5 (lima) Subdirektorat, dan 1 (satu) subbagian Tata Usaha, yang menjalankan fungsi:

a. Penyiapan perencanaan dan perancangan sistem informasi dan teknologi perbendaharaan;
b. Pelaksanaan kebijakan sistem informasi dan teknologi perbendaharaan;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem informasi dan teknologi perbendaharaan;
d. Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan teknologi perbendaharaan;

e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi sistem informasi dan teknologi perbendaharaan;
f. Pembinaan jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan direktorat jenderal perbendaharaan; dan
g. Pelaksanaan tata usaha direktorat sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.

Dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dit. SITP

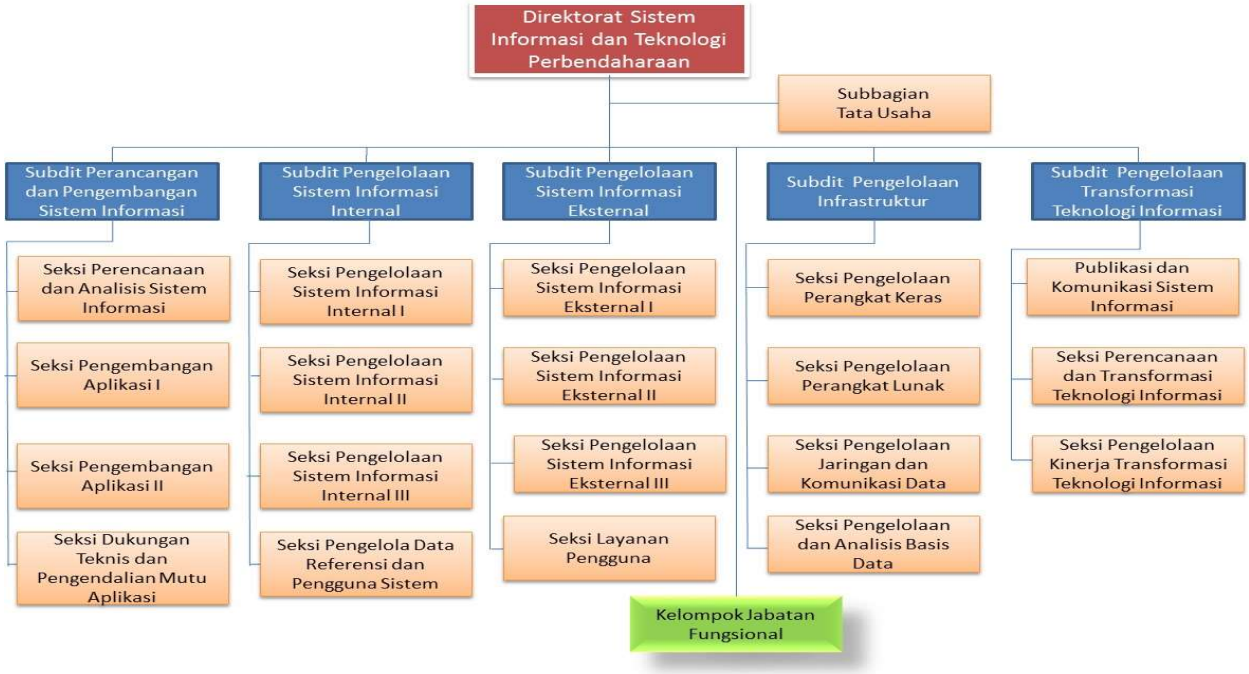

Profil pegawai Dit. SITP sampai dengan posisi tanggal 24 September 2020 berdasarkan data Renstra Dit. SITP tahun 2020 – 2024 adalah sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) orang pegawai, dengan komposisi pegawai sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian :
   1) Pegawai aktif = 195 pegawai
   2) Pegawai tugas belajar = 4 pegawai
2. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin :
   1) Laki-laki = 184 pegawai
   2) Perempuan = 15 pegawai
3. Jumlah pegawai berdasarkan usia :
   1) 20 – 29 tahun = 46 pegawai
   2) 30 – 39 tahun = 125 pegawai
   3) 40 – 49 tahun = 22 pegawai
   4) 50 – 59 tahun = 6 Pegawai
4. Jumlah pegawai berdasarkan status golongan/pangkat :

1) Gol II = 66 pegawai
2) Gol III = 120 pegawai
3) Gol IV = 13 pegawai

5. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :
   1) SMA = 2 pegawai
   2) D1 = 9 pegawai
   3) D3 = 49 pegawai
   4) D4/S1 = 99 pegawai
   5) S2 = 38 pegawai
   6) S3 = 2 pegawai

C. Peran Strategis

Tugas yang dilaksanakan oleh Dit. SITP sejalan dengan *strategic issued* di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagaimana yang diamanahkan dalam paket Undang-undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003, yaitu terkait dengan efektifitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tata kelola keuangan negara. Dalam undang-undang tersebut diamanahkan bahwa pelaksanaan pencatatan dan pelaporan keuangan negara berbasis akrual (*accrual basis*). Hal ini tentunya memerlukan kualitas sumber daya manusia dan sistem teknologi yang handal dan stabil. Oleh karena itu, maka tugas penyediaan sistem informasi dan teknologi dalam rangka mendukung dan mengimplementasikan Undang-undang tersebut selanjutnya diamanahkan kepada Direktorat SITP.

Dalam rangka menjalankan amanah Undang-undang Keuangan Negara tersebut, Dit. SITP telah merancang, membuat dan mengimplementasikan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan negara sehingga diharapkan diperoleh keuangan yang akurat, akuntabel dan transparan yang disebut dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Selain itu, Dit. SITP juga melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem aplikasi satuan kerja dalam bentuk Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Tujuan pengembangan aplikasi SAKTI ini adalah untuk meningkatkan validitas data transaksi keuangan negara yang dihasilkan, serta akan mendorong keberhasilan SPAN, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitasi pengelolaan keuangan negara di Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan sebagaimana yang diamanahkan dalam paket Undang-Undang Keuangan Negara.

Sejak mulai digunakan pada tahun 2018 hingga tahun 2020, Aplikasi SAKTI telah digunakan oleh satker-satker di lingkungan : Kementerian Keuangan, PPATK, KPK, LKPP, SETNEG, BAPENNAS, KemenPAN&RB untuk SAKTI-*Web* Full Modul; serta satker-satker dari 84 K/L lainnya, yang tersebar di seluruh Indonesia untuk SAKTI-*Web* Modul Admin dan Modul Penganggaran.

Pada tahun 2020, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintah, Kementerian Keuangan dan Bappenas bekerja sama melaksanakan reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran negara melalui kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Ditjen Perbendaharaan melalui Dit. SITP menjadi salah satu unit kerja di Kementerian Keuangan, bekerja sama dengan unit eselon I Kemenkeu lainnya, yaitu : Ditjen Anggaran, , Setjen Kemenkeu, dan Inspektorat Jenderal, mendapatkan tugas untuk mengembangkan sistem informasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran melalui Aplikasi SAKTI.

Pada akhir periode triwulan II tahun 2020, pengembangan RSPP melalui Aplikasi SAKTI Modul Penganggaran telah menyelesaikan Fitur RSPP dan KPJM, yang telah menerapkan rumusan sesuai RSPP, dan telah digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L TA 2021 dan perhitungan KPJM oleh seluruh K/L, pada awal bulan Juli 2020.

Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi IS #3, yaitu Layanan Digital Kementerian Keuangan, yang merupakan bagian dari Program Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (ISRBTK) Kemenkeu, Ditjen Perbendaharaan melalui Dit. SITP, terlibat dan bertindak selaku pengelola dan pendukung pada milestones pencapaian IS #3 tersebut, yaitu pengintegrasian platform layanan *contact center* di lingkungan Kemenkeu. HAI-DJPb selaku layanan pengguna DJPb mengambil posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan *milestone* ini, yaitu bertindak sebagai *backbone* dari integrasi *contact center* di lingkungan Kemenkeu. Infrastruktur dan Aplikasi CRM (Customer Relationship Management) yang digunakan oleh Contact Center HAI-DJPb, digunakan bersama-sama oleh beberapa Unit Eselon I Kemenkeu. Selain efisiensi biaya, pengintegrasian *contact center* Kemenkeu dalam satu platform layanan yang sama, memudahkan koordinasi dalam penanganan permasalahan yang diajukan oleh *stakeholders* Kemenkeu.

Namun demikian, dalam pengelolaan sistem informasi dan teknologi ini juga terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian bagi Direktorat SITP antara lain :

1. Meskipun memiliki peran strategis dalam mendukung tupoksi dan membantu menyelesaikan beban kerja DJPb serta Kemenkeu secara keseluruhan, namun Direktorat SITP sebagai Unit TIK DJPb belum memiliki kebijakan dan standar terkait Tata Kelola TIK yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang handal di lingkungan DJPb.
2. Direktorat SITP sebagai sebuah unit pengelola TIK DJPB, belum dapat optimal menjalankan perannya sebagai *enabler* atas pencapaian visi dan target organisasi. Dinamika perubahan regulasi dan proses bisnis yang menuntut kecepatan penyediaan aplikasi serta tuntutan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yang harus terus dilakukan terhadap sistem yang sudah berjalan mengakibatkan ruang dan energi untuk membuat inovasi baru yang lebih strategis tidak maksimal. Kondisi tersebut juga diakibatkan karena masih terjadi peran rangkap antara fungsi perancangan, *development* dan operasional dalam satu unit yang menurut tata kelola manajemen sistem informasi bukan merupakan kondisi ideal. Beberapa fungsi dimana SDM di Dit. SITP melaksanakan tugas dan peran rangkap sebagai berikut :
   a. Merancang, mengembangkan aplikasi, dan menjalankan operasional aplikasi-aplikasi;
   b. Menyusun proses bisnis dan peraturan untuk *core system* SPAN dan SAKTI;
   c. Mendampingi satker pada saat penyusunan laporan keuangan;
   d. Menyelenggarakan training/bimtek sekaligus sebagai trainer dan narasumbernya; dan,
   e. Menjadi tumpuan unit-unit di lingkup DJPb, untuk pemenuhan permintaan pengembangan aplikasi untuk keperluan jangka pendek (misal : Quick Wins, Lomba WBK/WBBM, Lomba Kantor Pelayanan, dll.).
3. Peningkatan volume transaksi untuk aplikasi-aplikasi *core* pengelolaan keuangan negara yang memiliki data terpusat, terintegrasi dan berskala nasional belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas infrastruktur dan pengamanan database yang ideal.
4. Proses *transfer knowledge* antar pegawai lama dengan pegawai baru di Dit. SITP khususnya tim operasional *system*/ infrastruktur membutuhkan masa transisi yang relatif lama, sehingga memerlukan ketepatan waktu (*timing*) penyediaan SDM pengganti untuk mengantisipasi munculnya potensi resiko operasional bahkan *fraud* akibat lamanya masa kerja SDM di satu fungsi

tertentu. Proses *transfer knowledge* dalam beberapa kondisi tertentu juga belum dapat dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan, sehingga berdampak terhadap timbulnya *gap knowledge* antar SDM di Dit. SITP.

5. Pesatnya perkembangan teknologi membutuhkan kompetensi SDM yang mampu menyerap, menganalisa dan memberi rekomendasi pilihan teknologi baik hardware maupun software yang dituangkan ke dalam dokumen kajian sebagai referensi investasi TIK. Selain itu, kemampuan untuk menghitung beban dan kebutuhan kapasitas infrastruktur (capacity planning) untuk periode tertentu juga menjadi tantangan yang masih harus dibenahi oleh SDM pada Dit. SITP.

D. Sistematika Laporan

Sistematika laporan kinerja ini disusun sebagai berikut :

1. Bab I — Berisi tentang latar belakang penyusunan Lakin; tugas, fungsi dan struktur organisasi Dit. SITP; kondisi SDM per tanggal 24 September 2020; peran strategis Dit. SITP dalam pengelolaan keuangan Negara; serta sistematika penyusunan Lakin.
2. Bab II — Berisi ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun 2020, yang menyajikan informasi tentang rencana strategis berupa visi, misi, dan tujuan strategis Dit. SITP tahun 2020-2024; target kinerja tahun 2020 sesuai Renstra Dit. SITP tahun 2020-2024; serta penetapan perjanjian kinerja tahun 2020.
3. Bab III — Berisi capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi tahun 2020, beserta penjelasan untuk setiap sasaran strategis tersebut. Di samping itu, disajikan pula informasi terkait uraian realisasi anggaran yang digunakan, serta informasi terkait inovasi dan penghargaan atas capaian kinerja lainnya Dit. SITP pada tahun 2020.
4. Bab IV — Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi yang telah tercapai, serta langkah-langkah yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Dit. SITP.
5. Lampiran — Terdiri dari Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Dit. SITP tahun 2020 beserta dokumen lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat SITP dijiwai oleh semangat dan komitmen dalam melaksanakan amanah reformasi di bidang keuangan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, telah ditetapkan Visi dan Misi Direktorat SITP yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan stategis (*strategic goals*) organisasi.

Visi Dit. SITP yaitu :

Menjadi Pengelola Teknologi Informasi Perbendaharaan yang Andal, Profesional, Inovatif dan Modern.

Misi Dit. SITP yaitu :

Dalam mewujudkan visinya, Direktorat SITP menetapkan beberapa misi yang sejalan dengan tugas dan fungsinya yang meliputi :

1. Menyiapkan perencanaan, perancangan dan strategi implementasi sistem informasi dan teknologi perbendaharaan;
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan sistem informasi dan teknologi perbendaharaan;
3. Menyiapkan penyusunan norma, pemenuhan standar, penyempurnaan prosedur, dan kriteria sistem informasi dan teknologi perbendaharaan;
4. Melaksanakan pengembangan, pemeliharaan dan operasioanalisasi system informasi dan teknologi perbendaharaan;
5. Memberikan bimbingan teknis, transfer knowlegde dan evaluasi sistem informasi dan teknologi perbendaharaan;
6. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra DJPb tahun 2020-2024, Dit. SITP turut mendukung pencapaian salah satu tujuan strategis DJPb, yaitu mewujudkan tercapainya Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien melalui penciptaan dan pencapaian sistem informasi yang andal dan terintegrasi.

Pencapaian misi Dit. SITP tersebut didetilkan melalui Kepdirjen Perbendaharaan nomor 627/PB/2018 tentang Cetak Biru TIK Ditjen Perbendaharaan tahun 2018-2023. Dengan *tagline* misi membangun *Cloud based Information Systems Mobile Platform*, *Less Paper, and More Educated People*, Dit. SITP mencoba melanjutkan pemanfaatan teknologi informasi terkini dengan tetap mengedepankan optimalisasi investasi TIK.

Untuk mendukung rencana strategis Kementerian Keuangan sebagaimana dituangkan dalam arah dan kebijakan DJPB 2020-2024, peranan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dalam konteks mendukung terciptanya kebijakan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien melalui sistem informasi yang andal, *modern* dan sesuai *best practice*, secara kongkrit diwujudkan dalam bentuk pengembangan dan operasional sistem teknologi informasi

perbendaharaan yang terintegrasi, fleksibel,dan ramah pengguna dengan strategi sebagai berikut :

1. Penguatan Organisasi TIK dan peningkatan Kualitas Tata Kelola TIK;
2. Penyelenggaraan manajemen pengembangan sistem aplikasi secara lebih terencana, modern dan profesional;
3. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan *business owner* dan para stakeholder untuk mendukung terciptanya simplifikasi sistem yang dapat saling interkoneksi dan terintegrasi;
4. Melakukan penguatan operasional sistem informasi sebagai *backbone* layanan perbendaharaan;
5. Tersedianya sistem informasi yang agile dan ramah pengguna;
6. Terciptanya layanan pengguna yang responsif dan modern;
7. Peningkatan kompetensi SDM TIK sesuai fungsi dan peran yang dibutuhkan dalam era digital.

Dalam rangka mengimplementasikan strategi pencapaian strategi Dit. SITP pada rencana strategis Dit. SITP tahun 2020-2024 tersebut, untuk target tahun 2020 dijabarkan dengan sasaran strategis yang jelas dan terukur, melalui pencapaian indikator kinerja yang ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Target Kinerja Direktorat SITP Tahun 2020 pada Renstra Dit. SITP 2020-2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020	UIC
1.	Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang andal, modern dan sesuai *best practice*			
	Terwujudnya sistem informasi dan keknologi perbendaharaan yang andal dan modern	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%	Subdit PTTI, PSIE
2.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi			
	Terwujudnya kepuasan pengguna layanan yang tinggi	Indeks kepuasan publik atas layanan Dit. SITP	4,52 (skala 5)	Subdit PTTI
3.	Perumusan Kebijakan Sistem Informasi yang berkualitas			
	Terwujudnya perumusan kebijakan sistem informasi yang berkualitas	Indeks ketepatan waktu penyelesaian kebijakan sistem informasi	4,5 (skala 5)	Subdit PTTI, PSIE
		Persentase Pemenuhan Rekomendasi Hasil Audit Tata Kelola TIK berdasarkan Cobit 5.0	80%	Subdit PTTI, PSIE, PSII, PI
4.	Tersedianya Sistem Informasi yang *agile*, interoperabilitas dan ramah pengguna			
	Terwujudnya ketersediaan sistem informasi yang *agile*, interoperabilitas dan ramah pengguna	Persentase tingkat penyempurnaan aplikasi perbendaharaan	100%	Subdit PPSI, PSIE, PSII, PI
		Persentase implementasi interkoneksi aplikasi perbendaharaan	80%	Subdit PPSI, PSIE, PSII, PI
		Persentase tingkat pemenuhan dokumen *Release Management*	100%	Subdit PPSI, PSIE, PSII
5.	Tersedianya infrastruktur TIK yang handal			
	Terwujudnya ketersediaan infrastruktur TIK yang handal	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	Subdit PPSI, PSIE, PSII, PI
		Indeks keberhasilan *switchover* sistem TIK pada DC/DRC	85	Subdit PPSI, PSIE, PSII, PI, PTTI
6.	Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang kredibel			

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020	UIC
	Terwujudnya Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang kredibel	Indeks Implementasi Tata Kelola TIK : Indeks SMKI	3 (skala 5)	Subdit PI
7.	Layanan Pengguna dan media komunikasi yang responsif dan modern			
	Terwujudnya layanan pengguna dan media komunikasi yang responsif dan modern	Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb	3,2 (skala 4)	Subdit PPSI, PSIE, PSII, PI
8.	Peningkatan kapasitas *stakeholders* yang efektif			
	Terwujudnya peningkatan kapasitas *stakeholders* yang efektif	Persentase tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	100%	Subdit PTTI
9.	Pengelolaan Sistem Informasi yang akuntabel dan transparan			
	Terwujudnya pengelolaan sistem informasi yang akuntabel dan transparan	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	89%	Subdit PPSI, PSII

B. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Perjanjian/Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Dit. SITP tahun 2020, ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan dengan Direktur SITP, yang memuat :

1) Pernyataan Kesanggupan;
2) Peta Strategi;

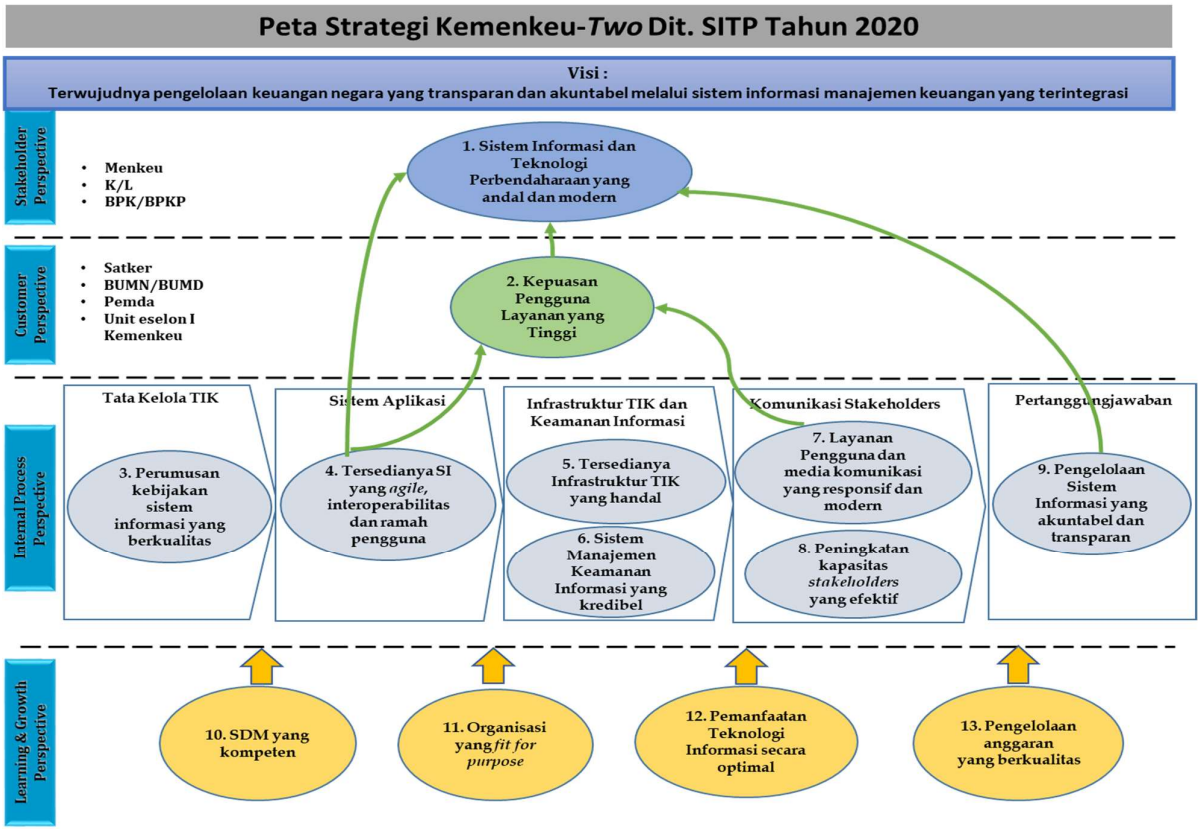

3) Perjanjian Kinerja tahun 2020,

4) Sasaran Kerja Pegawai;
5) Trajectory IKU; dan,
6) Inisiatif Strategis Kemenkeu-*Two* Dit. SITP tahun 2020.

Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Dit. SITP tahun 2020, terdiri atas 13 Sasaran Strategis yang terbagi ke dalam 4 perspective, yaitu sebagai berikut :

No.	*Perspective*	Sasaran Strategis
1.	*Stakeholders Perspective*	1) Sistem informasi dan teknologi perbendaharaan yang andal dan modern
2.	*Customer Perspective*	2) Kepuasan pengguna layanan yang tinggi
3.	*Internal Process Perspective*	3) Perumusan Kebijakan Sistem Informasi yang berkualitas
		4) Tersedianya Sistem Informasi yang *agile*, interoperabilitas dan ramah pengguna
		5) Tersedianya infrastruktur TIK yang handal
		6) Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang kredibel
		7) Layanan Pengguna dan media komunikasi yang responsif dan modern
		8) Peningkatan kapasitas *stakeholders* yang efektif
		9) Pengelolaan Sistem Informasi yang akuntabel dan transparan
4.	*Learning & Growth Perspective*	10) SDM yang kompeten
		11) Organisasi yang *fit for purpose*
		12) Pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal
		13) Pengelolaan anggaran yang berkualitas

Strategic goals Direkorat SITP tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja utama dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Two* Dit. SITP tahun 2020

Kode IKU	Uraian IKU	Target 2020
1a-CP	Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	100 %
2a-N	Indeks kepuasan publik atas layanan Dit. SITP	4,52 (Skala 5)
3a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian kebijakan sistem informasi	4,5 (Skala 5)
3b-N	Persentase Pemenuhan Rekomendasi Hasil Audit Tata Kelola TIK berdasarkan Cobit 5.0	80%
4a-N	Persentase tingkat penyempurnaan aplikasi perbendaharaan	100%
4b-N	Persentase implementasi interkoneksi aplikasi perbendaharaan	80%
4c-N	Persentase tingkat pemenuhan dokumen *Release Management*	100%
5a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100
5b-N	Indeks keberhasilan switchover sistem TIK pada DC/DRC	85
6a-N	Indeks Sistem Manajemen Keamanan Informasi	3 (Skala 5)
7a-N	Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb	3,2 (Skala 4)

8a-N	Persentase tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	100%
9a-N	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89%
10a-N	Nilai rata-rata *hard competency* pegawai	77
11a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization (SFO)*	83
11b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
12a-N	Persentase penyediaan fasilitas IoT untuk mendukung implementasi *smart office*	80%
13a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Dit. SITP	95%

Dalam rangka mewujudkan tercapainya visi, misi, target kinerja tahun 2020 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja tahun 2020, Dit. SITP didukung dengan pendanaan sebesar Rp 153.374.338.000 yang terbagi ke dalam 2 (dua) DIPA, yaitu :

1) DIPA Satker SPAN, sebesar Rp 37.048.044.000

2) DIPA Kantor Pusat DJPb, sebesar Rp Rp116.326.294.000

Sebelum ditetapkan, Kontrak Kinerja tahun 2020 adalah merupakan hasil *refinement* dari IKU Kontrak Kinerja tahun 2019. Beberapa perubahan merupakan penambahan Sasaran Strategis, IKU dan Inisiatif Strategis baru di tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis/ Inisiatif Strategis	IKU	Keterangan
1	Tersedianya Sistem Informasi yang *agile*, interoperabilitas dan ramah pengguna	Persentase tingkat pemenuhan dokumen *Release Management*	IKU baru Kemenkeu-*Two* Dit. SITP 2020
2	Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang kredibel	Indeks Sistem Manajemen Keamanan Informasi	IKU *Mandatory* Bidang TIK Kemenkeu
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal	Persentase penyediaan fasilitas IoT untuk mendukung implementasi *smart office*	IKU baru Kemenkeu-*Two* Dit. SITP 2020
4	Indeks Mutu dan Layanan	Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb	Inisiatif Strategis *Mandatory* Bidang TIK Kemenkeu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Direktorat SITP

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat SITP tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Direktorat SITP tahun 2020 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Direktorat SITP tahun 2020 dituangkan dalam bentuk Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yaitu sebesar 107,65 yang merupakan nilai rata-rata capaian IKU. Dari 13 (tiga belas) sasaran strategis yang ditetapkan di tahun 2020 seluruhnya dinyatakan berhasil mencapai target, bahkan beberapa IKU mampu diselesaikan melebihi target yang ditetapkan.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Direktorat SITP tahun 2020 berdasarkan indikator sasaran strategis dan indikator kinerja utama diuraikan sebagai berikut :

SS 1. Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang andal dan modern

Ditjen Perbendaharaan telah sukses dalam membangun sumber daya manusia. Selanjutnya, dengan tetap mengedepankan sinergi antara pihak-pihak terkait, Ditjen Perbendaharaan mulai mengembangkan sistem pengelolaan keuangan negara yang terotomasi sebagaimana yang diamanahkan dalam paket Undang-undang Keuangan Negara. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung dan menjalankan amanah tersebut diperlukan adanya sistem dan teknologi yang andal dan modern.

Pengembangan sistem tersebut selanjutnya didelegasikan oleh Ditjen Perbendaharaan kepada Direktorat SITP dan selanjutnya dikenal dengan nama Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SPAN merupakan program transformasi dan *high IT* berskala besar yang menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan sebagai leading *institutions*, meliputi pembangunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang sesuai dengan *best practices,* serta didukung oleh sistem informasi yang *modern,* baik yang terkait dengan *software* maupun *hardware.* Pengembangan SPAN melibatkan dan mengkoneksikan sistem informasi Perbendaharaan dan Anggaran di beberapa eselon I di Kementerian Keuangan serta berfokus pada penyempurnaan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi, dan manajemen perubahan.

Selain itu, kebijakan yang terkait dengan fungsi sistem informasi dan teknologi dalam rangka pengelolaan perbendaharaan yang modern diarahkan untuk mewujudkan integrasi informasi keuangan Kementerian/Lembaga secara nasional, *online,* dan *realtime* melalui implementasi aplikasi SAKTI dengan akuntansi berbasis akrual.

Indikator capaian sasaran kinerja di atas diwujudkan dalam indikator kinerja berupa :

1) IKU Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI

Isu utama yang muncul dalam implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2020 antara lain :

1. Munculnya pandemi Covid-19 pada akhir periode Triwulan I 2020, berdampak terhadap tidak dapat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang melibatkan pengumpulan orang/user banyak dalam satu tempat, misal pelaksanaan training dan UAT pengujian aplikasi SAKTI, sehingga target dan metode pelaksanaannya harus disesuaikan.

2. Di samping itu, target pelaksanaan Migrasi Saldo Awal SAKTI tahun 2020 untuk 5 K/L Piloting SAKTI Tahap IVA, harus disesuaikan karena terkendala adanya isu revaluasi aset tanah/bangunan yang dikoreksi (koreksi revaluasi).
3. Terdapat inisiatif reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran negara melalui kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) pada awal tahun 2020, yang pengembangan sistem informasinya disediakan melalui Aplikasi SAKTI (Modul Penganggaran) dan dilaksanakan oleh Direktorat SITP.
4. Sesuai dengan arahan dan putusan pimpinan Ditjen Perbendaharaan, terdapat perubahan strategi implementasi SAKTI pada tahun 2020, yang semula ruang lingkupnya adalah *Rollout* SAKTI *Web* Full Modul, dirubah menjadi *Piloting* SAKTI *Web* Full Modul Tahap V, dengan target K/L baru yaitu satker Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan DPR.
5. Implikasi atas perubahan strategi implementasi SAKTI tersebut, menyebabkan dilakukannya penyesuaian atas beberapa target milestone, sebagai berikut :
   1) ToT/EUT *Rollout* SAKTI, berubah menjadi ToT/EUT *Piloting* SAKTI Tahap V untuk 3 K/L.
   2) Penyusunan Rancangan PMK Implementasi SAKTI tahun 2020 tidak dilaksanakan, karena ruang lingkup implementasi Piloting SAKTI Tahap V masih sesuai dengan pengaturan dalam PMK No.159/PMK.05/2018 tentang pelaksanaan Piloting SAKTI sebagaimana dirubah dengan PMK 203/PMK.05/2019.
   3) Penyusunan Rancangan KMK Implementasi SAKTI tahun 2020, mengalami perubahan ruang lingkup implementasi, yang semula *Rollout* SAKTI, menjadi *Piloting* SAKTI *Web* Full Modul. KMK akan mengatur satker yang menerapkan, modul yang digunakan dan jadwal pelaksanaan *Piloting* SAKTI Tahap V.
   4) Pendampingan persiapan Gaji bulan Januari 2021, yang semula untuk satker K/L *Rollout* SAKTI, menjadi untuk satker K/L *Piloting* SAKTI Tahap V.
6. Namun demikian, sampai dengan akhir periode Triwulan IV tahun 2020, seluruh target penyelesaian atas 6 (enam) kegiatan utama beserta *milestone-milestone* implementasi SAKTI tahun 2020, yaitu : 1) Training dan Pelatihan SAKTI; 2) Pengembangan Aplikasi SAKTI; 3) Pembuatan dan Penyebaran Media Komunikasi; 4) Penyusunan Peraturan; 5) Operasional Aplikasi SAKTI; dan 6) Dukungan Infrastruktur, seluruhnya 100 % tercapai.
7. Selanjutnya, dalam rangka untuk menyukseskan implementasi *Rollout* SAKTI *Web Full Module* tahun 2021, dengan rincian peserta terdiri dari : satker dari 10 K/L yang telah mengikuti Piloting SAKTI Web *Full Module*; dan, satker dari 77 K/L yang baru akan mengimplementasikan SAKTI *Web* Full Modul (selain Modul Admin dan Modul Penganggaran), terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :
   1) Kesiapan infrastruktur (kualitas internet dan hardware) dan kesiapan pengguna (budaya/kompetensi teknis aplikasi) satker K/L.
   2) Kesiapan, kehandalan dan keamanan infrastruktur (*hardware*, aplikasi) DJPb dan jaringan Kemenkeu yang akan diakses secara serentak oleh pengguna satker K/L dengan jumlah kurang lebih 250.000 pengguna.
   3) Penyelenggaraan training/ pelatihan dengan metode *online* oleh Dit. SITP untuk satker K/L pengguna pertama kali SAKTI *Web,* perlu diimbangi dengan training *offline* oleh *trainer* SAKTI yang berada di unit-unit vertikal DJPb atau dengan melibatkan BPPK/BDK yang berada di seluruh Indonesia.
   4) Pemahamaan pengguna SAKTI pada satker K/L atas dampak Implementasi RSPP terhadap modul

pelaksanaan s.d. pelaporan SAKTI, baik yang telah mengimplementasikan SAKTI Web maupun belum.

5) Terbatasnya jumlah *resources* di Dit. SITP, yang telah terlibat dalam menangani persiapan dan implementasi SAKTI sejak tahun 2011 s.d. saat ini. Jumlah SDM yang terbatas tersebut, sebagian besar terlibat mulai dari penyusunan kebijakan, pengembangan sistem, narasumber training, pendamping satker K/L, penyedia layanan pengguna, operasional sistem, hingga penyusunan rencana pengadaan dan pengelolaan infrastruktur.
6) Dampak psikologis (kejenuhan dan kelelahan) dari *resources* di Dit. SITP yang terlibat dalam mengawal pengadaan, pengembangan dan implementasi SAKTI sejak tahun 2011 s.d. tahun 2020 (kurang lebih 9 tahun) yang tidak mengalami pergantian.
7) Tindak lanjut hasil Audit fungsionalitas dan keamanan sistem SAKTI yang dilaksanakan oleh Inspektorat VII ITJEN pada akhir tahun 2020.
8) Belum ditetapkan strategi penerapan perlindungan keamanan informasi melalui *One Time Password* (OTP) untuk seluruh satker K/L peserta *Rollout* SAKTI.

Sampai dengan akhir tahun 2020, seluruh target kinerja terkait implementasi SAKTI tahun 2020, beserta penyelesaian atas isu-isu utamanya berhasil tercapai seluruhnya.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	100%	100%	100

Capaian indikator tersebut diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan implementasi SAKTI tahun 2020 sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Periode	No	Kegiatan	Target		Realisasi	Keterangan
			Waktu	%		
	1	**TRAINING DAN PELATIHAN SAKTI**				
Semester I		1) Pendampingan Piloting SAKTI pada 5 K/L (20 satker)	Jan - Feb	100%	100%	
		2) ToT SAKTI Web Modul Admin dan Modul Anggaran untuk DJA	Jan – Feb	100%	100%	
		3) Refreshment ToT SAKTI 5 K/L	Jan – Mar	100%	100%	
		4) FGD Strategi Implementasi SAKTI Web pada K/L tahun 2020	Jun	100%	100%	
Semester II		5) Refreshment ToT SAKTI Web dan pendampingan RKAKL 2021 semua KL	Agt – Sep	100%	100%	
		6) Refreshment Training SAKTI untuk KPPN dan Kanwil	Agt – Sep	100%	100%	
		7) Refreshment Training SAKTI Manajerial untuk KPPN dan Kanwil	Okt – Nov	100%	100%	
		8) EUT SAKTI Web Full Module Satker K/L Piloting SAKTI Tahap V (3 K/L)	Okt - Nov	100%	100%	
	2	**PENGEMBANGAN APLIKASI SAKTI**				
Semester I		1) Pengembangan Redesign Anggaran	Jan - Apr	100%	100%	
	3	**PEMBUATAN DAN PENYEBARAN MEDIA KOMUNIKASI**				
Semester I		1) Pembuatan Panduan Penyelenggaraan Training SAKTI Web untuk K/L	Apr – Jun	100%	100%	
		2) Penerbitan flyer (2 kali), standing banner, dan media komunikasi lainnya	Jan – Jun	100%	100%	
Semester II		3) Penerbitan flyer (2 kali), standing banner, dan media komunikasi lainnya	Jul - Des	100%	100%	
	4	**PENYUSUNAN PERATURAN/ KEBIJAKAN**				
Semester II		1) Penetapan Exit Criteria Piloting SAKTI Tahap IV melalui Kepdirjen Perbendaharaan	Agt - Sep	100%	100%	
		2) Penyusunan Rancangan PMK Implementasi SAKTI 2020	Jul - Sep	100%	N/A	
		3) Penyusunan Rancangan KMK Piloting SAKTI Tahap V	Okt - Des	100%	100%	

Periode	No	Kegiatan	Target		Realisasi	Keterangan
			Waktu	%		
	5	IMPLEMENTASI APLIKASI SAKTI				
Semester I		1) Penyelesaian Pendaftaran email kedinasan bagi satker K/L	Jan – Mar	100%	100%	
		2) Set up konfigurasi satker dan pendaftaran user SAKTI Web	Jan - Mar	100%	100%	
		3) Pendampingan Migrasi Saldo awal SAKTI tahun 2020 (untuk 5 K/L)	Mar – Jun	100%	100%	
		4) Pendampingan penyelesaian Revisi DIPA 2020 (Modul Anggaran)	Jan - Jun	100%	100%	
Semester II		5) Pendampingan penyelesaian Revisi DIPA 2020 (Modul Anggaran)	Jul – Des	100%	100%	
		6) Pendampingan penyusunan RKA KL/DIPA 2021	Okt – Nov	100%	100%	
		7) Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Semester I 2020 (dengan SAKTI) (7 K/L)	Jul	100%	100%	
		8) Pendampingan persiapan Gaji Januari 2021 satker K/L Piloting SAKTI Tahap V (3 K/L)	Des	100%	100%	
	6	DUKUNGAN INFRASTRUKTUR				
Semester I		1) Penyelesaian penyediaan akses internet satker K/L oleh BLU BAKTI	Jan - Mar	100%	100%	
		2) Penyediaan Server Training SAKTI	Apr	100%	100%	
		Total Capaian 2020 :		100%	100%	

SS 2. Kepuasan Pengguna Layanan yang tinggi

Dalam pengimplementasian SPAN dan SAKTI masih terdapat beberapa isu yang harus dilakukan identifikasi untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para user. Dimana apabila masih terjadi beberapa permasalahan harus segera di identifikasi yang diberikan solusi penyelesaian dari permasalahan tersebut. Kecepatan respon yang diberikan kepada user akan mempengaruhi persepsi dari user terhadap SPAN dan SAKTI dan termasuk juga terhadap kepuasan user terhadap kualitas layanan yang diberikan saat implementasi. Kepuasan Pengguna Layanan yang tinggi adalah pelayanan kepada stakeholders yang mengutamakan aspek peningkatan dan perbaikan layanan yang inovatif dan berkelanjutan mencakup indikator *tangible, reliability, responsiveness, assurance* dan *empathy*.

Indikator capaian sasaran kinerja di atas diwujudkan dalam indikator kinerja berupa :

2) IKU Indeks kepuasan publik atas layanan Dit. SITP

Isu utama yang muncul dalam indikator kinerja ini adalah :

1. Pengukuran capaian atas IKU Indeks kepuasan publik atas layanan Dit. SITP berdasarkan kepada hasil Survei Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Implementasi Sistem Informasi dan Teknologi DJPb. Survei dilakukan setahun sekali sejak tahun 2015, yang diselenggarakan secara *online* kepada responden yang telah ditentukan.
2. Tujuan survei untuk mengevaluasi tingkat kepuasan dan mendapatkan *feedback* dari pengguna terhadap performa operasional sistem informasi dan teknologi DJPb.
3. Responden survei merupakan para pengguna Sistem Informasi dan Teknologi DJPb terdiri dari : internal DJPb (KPPN dan Kanwil DJPb), DJA, Satker BA 999, dan satker mitra kerja KPPN, yang merupakan user SPAN, OM SPAN, Custom-Web, E-Rekon&LK, dan SAKTI.
4. Hasil skor survei untuk 3 tahun terakhir, adalah sebagai berikut : tahun 2017= 4,47 dari target 4 (skala 5); tahun 2018= 4,72 dari target 4,52 (skala 5); dan, tahun 2019= 4,64 dari target 4,52 (skala 5).

5. Untuk hasil skor survei tahun 2020 diperoleh nilai= 4,65 dari skala 4,52.

Realisasi capaian indeks kepuasan publik atas layanan Dit. SITP tahun 2020, sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan publik atas layanan Dit. SITP	4,52 (skala 5)	4,65 (skala 5)	102,9

Hasil capaian di atas dicapai dengan tindakan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Pelaksanaan survei telah dilaksanakan pada periode tgl 22 Juni s.d. 3 Juli 2020 melalui Nota Dinas Sekretaris DJPb No.ND-1891 dan ND-1892/PB/2020 tgl 23 Juni 2020 tentang Pemberitahuan Survei Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Implementasi Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perbendaharaan tahun 2020.
2. Hasil Laporan Survei Tingkat Kepuasan Pengguna atas Implementasi Sistem Informasi dan Teknologi DJPb 2020, telah dipaparkan kepada Dirjen Perbendaharaan pada acara *Board of Director* DJPb pada tgl 3 September 2020 oleh Tim Peneliti Universitas Indonesia.
3. Responden survei terdiri dari para pengguna Sistem Informasi dan Teknologi DJPb, yaitu : dari internal DJPb (KPPN dan Kanwil DJPb); DJA; Satker BA 999; dan, satker mitra kerja KPPN, yang merupakan user SPAN, OM SPAN, Custom-Web, E-Rekon&LK, dan SAKTI.

SS 3. Perumusan Kebijakan Sistem Informasi yang berkualitas

Perumusan Kebijakan Sistem Informasi yang berkualitas adalah penyusunan kebijakan dan standar yang terkait dengan bidang pengembangan aplikasi, keamanan informasi, pengelolaan infrastruktur, proses bisnis IT, dan tata kelola TIK, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan TIK dan layanan IT di lingkungan Dit. SITP, sehingga dapat sesuai dengan standar umum yang berlaku (ISO) di bidang IT. Penyusunan kebijakan dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya : penyesuaian atas perubahan standar internasional (ISO); perubahan proses bisnis; rekomendasi hasil audit atau assesmen sistem informasi, serta pemenuhan kebutuhan pengguna layanan sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) sistem berskala besar dan *core system* yang dikembangkan dan dioperasionalkan di Direktorat SITP yaitu : Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN); Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI); dan Modul Penerimaan Negara *Generation* 3 (MPN G3). Selain itu, juga dikembangan suatu sistem monitoring informasi terkini atas pelaksanaan anggaran negara dalam bentuk *Online Monitoring* SPAN (OM SPAN). Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pemikiran atas konsep pengembangan sistem TIK dan arah pengembangan IT Ditjen Perbendaharaan untuk masa mendatang yang sesuai dengan tata kelola TIK dan *best practice*.

Dalam rangka mencapai pemahaman atas konsep TIK tersebut, materi dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kajian dan perumusan kebijakan tentang Sistem Informasi yang dapat diperoleh dari beberapa literatur/peraturan mengenai TIK maupun *business requierements* dari *business unit* terkait telah disusun ke dalam beberapa kajian SIT.

Indikator capaian sasaran kinerja di atas diwujudkan dalam indikator kinerja berupa:

3) IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian kebijakan sistem informasi

Isu utama yang muncul dalam indikator kinerja ini pada tahun 2020, adalah :

1. Pengukuran capaian atas IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian kebijakan sistem informasi

berdasarkan capaian 2 (dua) komponen, sbb : 1) Indeks kualitas penyelesaian rancangan (untuk capaian IKU semester I); dan, 2) Indeks kualitas penetapan peraturan (untuk capaian IKU semester II).

2. Terdapat perubahan target kebijakan yang diselesaikan pada tahun 2020, semula terdiri dari 2 peraturan yaitu rancangan Perdirjen Perbendaharaan tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan HAI DJPb dan rancangan Perdirjen Perbendaharaan tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Namun dalam perkembangannya, terdapat penambahan target, menjadi 5 rancangan peraturan, yaitu rancangan Perdirjen Perbendaharaan tentang Kebijakan Tata Kelola TIK DJPb digantikan dengan rancangan Perdirjen Perbendaharaan tentang Kebijakan SMKI di Lingkungan DJPb sebagai pengganti PER-17/PB/2019, serta ditambah dengan rancangan Kepdirjen Perbendaharaan tentang Penetapan *Exit Criteria* Piloting SAKTI, dan rancangan KMK tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap V.
3. Sampai dengan akhir periode Triwulan IV 2020, dari 5 target kebijakan yang disusun dan diajukan Dit. SITP, 4 peraturan telah ditetapkan, yaitu : Perdirjen No.PER-8/PB/2020 tgl. 31 Maret 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan HAI DJPb; Perdirjen Perbendaharaan No.PER-16/PB/2020 tgl. 13 Agustus 2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting SAKTI; Kepdirjen No..KEP-305/PB/2020 tgl. 30 Desember 2020 tentang Penetapan *Exit Criteria* Piloting SAKTI, dan KMK No.537/KMK.05/2020 tgl. 25 November 2020 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap V.
4. Sedangkan untuk progress penyelesaian rancangan Perdirjen Perbendaharaan tentang Kebijakan SMKI di Lingkungan DJPb sebagai pengganti PER-17/PB/2019, saat ini telah diajukan melalui Direktorat SP dan Sekretariat DJPb untuk proses penetapan oleh Dirjen Perbendaharaan.

Realisasi capaian penyelesaian kebijakan sistem informasi tahun 2020 adalah :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks ketepatan waktu penyelesaian kebijakan sistem informasi	4,5	4,5	100

Hasil capaian di atas dicapai dengan tindakan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Perdirjen Perbendaharaan tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan HAI DJPb telah ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan melalui Perdirjen No.PER-8/PB/2020 tgl. 31 Maret 2020.
2. Perdirjen Perbendaharaan No.PER-16/PB/2020 tgl. 13 Agustus 2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting SAKTI.
3. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap V telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui KMK No.537/KMK.05/2020 tgl. 25 November 2020.
4. Kepdirjen Perbendaharaan tentang Penetapan *Exit Criteria* Piloting SAKTI telah ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan melalui No..KEP-305/PB/2020 tgl. 30 Desember 2020.
5. Rancangan Perdirjen Perbendaharaan tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan pengganti PER-17/PB/2019 telah diajukan ke Direktorat SP dan Sekretariat DJPb melalui ND-18/PB.8/2021 tgl. 6 Januari 2021 untuk proses *legal drafting* dan penetapan oleh Dirjen Perbendaharaan, dan telah ditetapkan menjadi Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-1/PB/2021 tgl. 15 Januari 2021 tentang Kebijakan SMKI di lingkungan DJPb .

4) Persentase Pemenuhan Rekomendasi Hasil Audit Tata Kelola TIK berdasarkan Cobit 5.0

Isu Utama yang muncul dalam indikator kinerja ini pada tahun 2020, adalah :

1. Pengukuran capaian atas IKU Persentase pemenuhan rekomendasi hasil audit tata kelola TIK berdasarkan Cobit 5.0 berdasarkan kepada rekomendasi Cobit 5.0 yang telah selesai ditindaklanjuti.

2. Ruang lingkup rekomendasi Cobit 5.0, meliputi : *Assessment of information processing facilities; Assessment of control mechanism in inputs, processing, outputs; Assessment of the governance structure; Assessment of systems development standards; Assessment of performance/ capacity analysis/scalability*.
3. Dari total rekomendasi audit Cobit 5.0 sejumlah **484**, sejumlah **93** rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti pada tahun 2019, sehingga sisa rekomendasi Cobit 5.0 menjadi **391** rekomendasi.
4. Berdasarkan hasil pembahasan internal Dit. SITP, disepakati jumlah rekomendasi yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2020, adalah **93** rekomendasi (rincian sebagaimana tercantum dalam tabel).

Target Rekomendasi Hasil Asessment Cobit SPAN tahun 2020

No	Sub Direktorat	Ruang Lingkup Rekomendasi				Jumlah Rekomendasi Cobit Tahun 2020
		IT Governance	***Control Mechanism***	***Information Processing Facilities***	***Performance, Capacity Analysis, Scalability***	
1	**PTTI**	22	0	0	0	**22**
2	**PSIE**	4	0	0	0	**4**
3	**PSII**	3	57	0	1	**61**
4	**PI**	3	0	0	3	**6**
Total		**32**	**57**	**0**	**4**	**93**

5. Sampai dengan periode triwulan IV 2020, progres penyelesaian rekomendasi Cobit, adalah sebagai berikut : **80** rekomendasi telah selesai; dan, **2** rekomendasi *in proress*, dan **11** rekomendasi belum dimulai sehingga capai realisasinya : (80/93) x 100% = **86,02%.**

Realisasi capaian penyelesaian rekomendasi audit Cobit 5.0 tahun 2020 adalah :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan rekomendasi hasil audit tata kelola TIK berdasarkan Cobit 5.0	80%	86,02%	111,6

Hasil capaian di atas dicapai dengan tindakan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Melaksanakan agenda rapat mingguan pembahasan rekomendasi Cobit 5.0 di internal Dit. SITP.
2. Beberapa rekomendasi hasil audit Cobit 5.0 untuk tahun 2020, yang ditindaklanjuti pada periode triwulan IV 2020, diantaranya :
   a) Penetapan SK Direktur SITP tentang Penetapan Kelompok Kerja Tim Teknis Survei Tingkat Kepuasan terhadap Tata Kelola TIK menggunakan Standar Cobit 5.0.
   b) Penyelesaian beberapa rekomendasi terkait infrastruktur dan keamanan informasi oleh Subdit PI.
   c) Penyelesaian penyusunan standar pelaporan (SOP) terkait *problem management* dan manajemen insiden yang mencakup status penyelesaian masalah dan langkah penyelesaian masalah yang telah diambi secara berkala.

SS 4. Tersedianya Sistem Informasi yang *agile*, interoperabilitas dan ramah pengguna

Sistem informasi yang *agile*, berarti sistem informasi yang dihasilkan melalui metodologi pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada Iterative dan Incremental Model, yaitu metode pengembangan sistem yang bersifat jangka pendek, yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Interoperabilitas, berarti kapabilitas sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya, agar dapat berinteraksi dan berfungsi dengan sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi. Ramah pengguna, diraih melalui optimalisasi fungsi User Experience (UX) pada saat perancangan User Interface Design (UID) sebuah sistem aplikasi, sehingga pengguna mudah menggunakannya serta memberikan tampilan yang menarik.

Indikator utama dalam rangka pencapaian sasaran kinerja ini diwujudkan dalam beberapa indikator kinerja antara lain :

5) IKU Persentase tingkat penyempurnaan aplikasi perbendaharaan

Isu Utama yang muncul dalam indikator kinerja ini pada tahun 2020, adalah :

1. Pengukuran capaian atas IKU Persentase Tingkat Penyempurnaan Aplikasi Perbendaharaan berdasarkan capaian komponen : 1) Penyelesaian pengembangan aplikasi perbendaharaan, mulai dari tahap perencangan, analisis pengujian; dan, 2) Pengajuan hosting aplikasi ke server/virtual machine (VM), untuk aplikasi-aplikasi yang ditargetkan akan diselesaikan pada tahun 2020.
2. Untuk tahun 2020, telah ditargetkan 30 (tiga puluh) aplikasi yang akan dikembangkan (*update* aplikasi dan aplikasi baru) oleh Direktorat SITP.
3. Sampai dengan periode triwulan IV 2020, dari target 30 aplikasi, seluruhnya telah selesai dikembangkan, sehingga realisasinya mencapai **100%**.
4. Sebagai tindak lanjut atas implementasi Perdirjen Perbendaharaan No.PER-26/PB/2019 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan DJPb, di Dit. SITP telah ditetapkan SK Direktur SITP tentang Tim Kebijakan Pengembangan dan proses penyusunan *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk prosedur pengajuan *End User Development* (EUD) dari unit pengusul pengembangan aplikasi dilingkup DJPb.

Terlepas dari isu-isu utama tersebut, dari target sejumlah 30 (tiga puluh) aplikasi yang dikembangkan di tahun 2020 (update aplikasi dan aplikasi baru), telah seluruhnya tercapai, sehingga realisasi capaiannya 100%.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tingkat penyempurnaan aplikasi perbendaharaan	100%	100%	100

Hasil capaian IKU persentase tingkat penyempurnaan aplikasi perbendaharaan dicapai dengan tindakan yang telah dilaksanakan yang tercantum dalam realisasi capaian berdasarkan unit kerja yang mengembangkan, sampai dengan Triwulan IV 2020, sebagai berikut :

No	UIC	Jumlah Aplikasi		Target Aplikasi	Realisasi	
		Update	Baru		Jumlah Aplikasi	%
1	PPSI	11	4	15	15	100

2	PSIE	4	1	5	5	100
3	PSII	3	7	10	10	100
		Total :		**30**	**30**	**100%**

6) IKU Persentase implementasi interkoneksi aplikasi perbendaharaan

Persentase implementasi interkoneksi aplikasi perbendaharaan mengukur ketepatan waktu penyelesaian pengembangan interkoneksi, antara aplikasi perbendaharaan (Aplikasi BUN (SPAN dan OM SPAN); Aplikasi Satuan Kerja (termasuk Aplikasi SAKTI), dan; Aplikasi Supporting lainnya) yang dikembangkan di Dit. SITP, dengan aplikasi eksternal di luar DJPb (Unit Eselon I lain lingkup Kemenkeu, Kementerian/Lembaga lain, Perbankan, dlsb.), maupun antar aplikasi aplikasi perbendaharaan.

Sampai dengan periode Triwulan IV 2020, jumlah target yang telah ditetapkan pada awal tahun, yaitu 19 (sembilan belas) interkoneksi yang akan dikembangkan di tahun 2020 (dengan aplikasi internal dan eksternal Dit. SITP), tercapai 18 (empat belas) interkoneksi, sehingga realisasi capaiannya 97,62%.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase implementasi interkoneksi aplikasi perbendaharaan	80%	97,62%	120

Isu Utama yang muncul dalam indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian atas IKU Persentase implementasi interkoneksi aplikasi perbendaharaan berdasarkan capaian 2 (dua) komponen sebagai berikut : 1) Penyiapan aplikasi dan pengembangan interkoneksi; dan, 2) Penyiapan data dan network interkoneksi.
2. Sampai dengan periode triwulan IV 2020, dari target 19 (sembilan belas) pengembangan interkoneksi, terdapat progres pengembangan interkoneksi yang telah mencapai lebih dari 70% dan 100% yaitu sebanyak 18 (delapan belas) interkoneksi, sebagaimana dalam tabel berikut :

No	Subdit UIC	Target Interkoneksi	Realisasi	
			Jml Interkoneksi	%
1	PPSI	2	2	100
2	PSIE	14	13	92,85
3	PSII	3	3	100
Total :		19	18	97,62%

7) IKU Persentase tingkat pemenuhan dokumen *Release Management*

Persentase tingkat pemenuhan dokumen Release Management mengukur ketepatan waktu penyelesaian Dokumen Implementasi/ Rilis Sistem Informasi atas aplikasi/sistem informasi yang akan diimplementasikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perdirjen Perbendaharaan Nomor 26/PB/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2020. Tujuan dari IKU ini adalah Memonitor progres

penyelesaian penyelesaian Dokumen Implementasi/ Rilis Sistem Informasi atas aplikasi/sistem informasi yang akan diimplementasikan.

Isu Utama yang muncul terkait dengan indikator kinerja unit ini adalah Pengukuran capaian atas IKU Persentase tingkat pemenuhan dokumen *Release Management* berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian Dokumen Implementasi/ Rilis Sistem Informasi atas aplikasi/sistem informasi yang akan diimplementasikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perdirjen Perbendaharaan Nomor 26/PB/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

Adapun hasil capaian dari IKU ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tingkat pemenuhan dokumen *Release Management*	100%	100%	100

Hasil capaian di atas dicapai dengan tindakan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Dokumen Rilis atas modifikasi cetakan dokumen SP2B BLU agar dapat mengakomodir akun 81XXXX dan 82XXXX sebagai transaksi transfer masuk dan keluar antar BLU (sesuai ND Dir APK No ND-446-PB-2020 Tentang User Requirements Pengembangan Aplikasi terkait Transaksi Transfer Kas antar BLU dengan Sumber Dana dari Surplus Anggaran BLU).
2. Dokumen Rilis atas deploy program Telaah LKPP Terintgrasi G2 pada server P7 dan P8.
3. Dokumen Rilis atas deploy program SIKRI dari SPAN DEV ke Production
4. Dokumen Rilis atas deploy perbaikan program Face LKBUN G2.
5. Dokumen Rilis atas pengembangan Modul-Modul dalam Aplikasi SAKTI dari mulai bulan Januari s.d. Juli 2020.

SS 5. Tersedianya infrastruktur TIK yang handal

Tersedianya infrastruktur TIK yang handal adalah infrastruktur yang harus mampu menjadi operational backbone untuk semua sistem yang ada dan sistem yang akan digunakan oleh DJPb berikutnya. Handal yang dimaksud termasuk dari sisi ketersediaan, kompatibilitas, dan keamanan, serta harus mampu mendukung misi *Cloud Based Information Systems*: *Mobile Platform*, *Less Paper*, *More Educated People*.

Indikator utama dalam rangka pencapaian sasaran kinerja ini diwujudkan dalam beberapa indikator kinerja antara lain :

8) IKU Kualitas Pengelolaan Sistem TIK

IKU ini terdiri dari 2 komponen yakni : 1) Tingkat Downtime Sistem TIK dan 2) Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK.

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur kualitas pengelolaan sistem TIK melalui ketersediaan sistem layanan TIK dalam rangka meningkatkan ketersediaan layanan TIK dengan tingkat downtime yang seminimal mungkin, dan penyelesaian proyek strategis TIK yang terdapat dalam IS RBTK maupun yang tidak terdapat dalam IS RBTK.

Isu Utama yang muncul terkait dengan indikator kinerja unit ini adalah :

1) Pengukuran capaian atas IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK berdasarkan rata-rata capaian komponen (sub IKU) : 1) Tingkat *Downtime* Sistem TIK DJPb (Minimize, target triwulanan=0,1%); dan, 2) Penyelesaian Proyek Strategis TIK DJPb (Maximize, target triwulanan=85%).

2) Sampai dengan periode Triwulan IV 2020, realisasi untuk IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK adalah **158,28** dari target **100.**

3) Angka capaian tersebut diperoleh dari hasil rata-rata capaian komponen Tingkat *Downtime* Sistem TIK DJPb **198,9** dan capaian Penyelesaian Proyek Strategis TIK DJPb **117,65**.

4) Untuk komponen Tingkat *Downtime* Sistem TIK DJPb, capaian tingkat *downtime* s.d. periode Triwulan IV 2020 adalah 0,0011%. Sejak periode triwulan III – IV 2020, seluruh Sistem TIK DJPb (SPAN, MPN G3, OMSPAN, SAKTI dan eRekon&LK) tidak ada yang mengalami *downtime*.

5) Untuk komponen Penyelesaian Proyek Strategis TIK DJPb, s.d. periode Triwulan IV 2020, seluruh target tahapan proyek telah tercapai 100% seluruhnya.

Realisasi capaian IKU Kualitas pengelolaan sistem TIK tahun 2020 adalah :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Kualitas pengelolaan sistem TIK	100	158,28	120

Tindakan yang telah dilaksanakan guna mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

1) Kertas Kerja Monitoring Tingkat Downtime Sistem TIK DJPb s.d. Periode Triwulan IV 2020 :

NO	LAYANAN	Komponen Downtime	Jan	Feb	s.d Q1	April	Mei	s.d Smt I	Juli	Agust	s.d Q3	Okt	Nop	s.d Y 2020
1	SPAN	Server/OS	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
		Aplikasi	0.1818%	0.0952%	0.0635%	0.0476%	0.0396%	0.0328%	0.0278%	0.0247%	0.0217%	0.0197%	0.0179%	0.0164%
		Database	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
		Total Downtime SPAN	0.0606%	0.0317%	0.0212%	0.0159%	0.0132%	0.0109%	0.0093%	0.0082%	0.0072%	0.0066%	0.0060%	0.0055%
2	SETELMEN MPN G3	Server/OS	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
		Aplikasi	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0062%	0.0051%	0.0043%	0.0039%	0.0034%	0.0031%	0.0028%	0.0026%
		Database	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
		Total Downtime MPN G2	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0021%	0.0017%	0.0014%	0.0013%	0.0011%	0.0010%	0.0009%	0.0009%
3	OM SPAN	Server/OS	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
		Aplikasi	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
		Database	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
		Total Downtime OM SPAN	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
4	SAKTI	Server/OS	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
		Aplikasi	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
		Database	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
		Total Downtime OM SPAN	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
5	E-REKON & LK	Server/OS	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
		Aplikasi	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
		Database	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
		Total Downtime E-REKON	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
6	CUSTOM WEB	Server/OS	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
		Total Downtime E-REKON	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
	DOWNTIME UNIT ESELON I (Kertas Kerja Lama)		0.0101%	0.0053%	0.0035%	0.0026%	0.0025%	0.0021%	0.0018%					
	DOWNTIME UNIT ESELON I (new SE-31/2020)		0.0101%	0.0053%	0.0035%	0.0026%	0.0025%	0.0021%	0.0018%	0.0016%	0.0014%	0.0013%	0.0011%	0.0011%

2) Kertas Kerja Monitoring Proyek Strategis TIK DJPb s.d. Periode Triwulan IV 2020 :

No	Nama Proyek	Rencana Kerja Proyek		Tahapan Proyek		Target %	Target Selesai	UIC SITP	Progres Penyelesaian Tahun 2020				Capaian %	Keterangan
									Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Pengadaan hardware SAKTI**	1	Penambahan Server	1	Penyusunan TOR dan Spesifikasi	10%	Q1	PTTI, PI	10%	10%	10%	10%	100	Selesai
				2	Proses pengadaan	10%	Q1	PTTI, PI	0%	10%	10%	10%	100	Selesai
				3	Penandatanganan Kontrak	10%	Q2	PTTI, PI	0%	10%	10%	10%	100	Selesai
				4	Deployment dan Instalasi	10%	Q2	PI	0%	0%	10%	10%	100	Selesai
				5	Operasional	60%	Q3	PI	0%	0%	60%	60%	100	Selesai
		2	Pengadaan Switch	1	Penyusunan TOR dan Spesifikasi	10%	Q1	PTTI, PI	0%	10%	10%	10%	100	Selesai
				2	Proses pengadaan	10%	Q1	PTTI, PI	0%	10%	10%	10%	100	Selesai
				3	Penandatanganan Kontrak	10%	Q2	PTTI, PI	0%	10%	10%	10%	100	Selesai
				4	Deployment dan Instalasi	10%	Q2	PI	0%	0%	10%	10%	100	Selesai
				5	Operasional	60%	Q3	PI	0%	0%	60%	60%	100	Selesai
2	**Implementasi SAKTI**	1	Piloting SAKTI (Lanjutan)	1	Implementasi SAKTI Web terbatas modul admin dan penganggaran ke seluruh satker K/L	50%	Q2	PSIE	50%	50%	50%	50%	100	Selesai
				2	Implementasi SAKTI Desktop semua modul terbatas pada 5 K/L (Bappenas, Setneg, KemenpanRB, LKPP dan KPK)	50%	Q4	PSIE	50%	50%	50%	50%	100	Selesai
		2	Operasional Support SAKTI	1	Penyusunan TOR dan Spesifikasi	10%	Q1	PTTI, PI	0%	10%	10%	10%	100	Selesai
				2	Proses pengadaan	20%	Q2	PTTI, PI	0%	20%	20%	20%	100	Selesai
				3	Penandatanganan Kontrak	20%	Q2	PTTI, PI	0%	0%	20%	20%	100	Selesai
				4	Operasional	50%	Q4	PI, PSIE	0%	0%	50%	50%	100	ontrack
3	***Government Payment Platform***	1	Pembangunan sistem *Government Payment Platform*	1	Penunjukan Tim Pengembang	10%	Q2	PTTI, PI	0%	10%	10%	10%	100	Selesai
				2	Penyamaan Data SDM dengan Payroll	30%	Q3	PPSI	0%	0%	0%	30%	100	Selesai
				3	*Development Interface* untuk *Government Payment Platform*	30%	Q4	PPSI	0%	0%	0%	30%	100	Selesai
				4	Pelaksanaan *User Acceptance Test*	10%	Q4	PPSI	0%	0%	0%	10%	100	Selesai
				5	Penyiapan infrastruktur pendukung	20%	Q4	PI	0%	0%	0%	20%	100	Selesai

9) IKU Indeks keberhasilan switchover sistem TIK pada DC/DRC

Switchover sistem TIK pada DC dan DRC merupakan kegiatan pengalihan operasional sistem TIK dari DC ke DRC hingga kembali lagi ke DC yang mengacu pada ketersediaan dan kesesuaian dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) serta keberlangsungan sistem TIK selama beroperasi di DRC. Dengan keberhasilan switchover sistem TIK, diharapkan dapat meminimalisir kegagalan sistem pada saat terjadi keadaan kahar dalam rangka menjamin kelangsungan proses bisnis Kemenkeu. Dengan demikian layanan TIK dapat terjaga ketersediaannya atau segera dioperasikan sesuai dengan norma waktu yang disepakati dengan mengacu pada rencana/skenario pengujian yang menjadi bagian dari dokumen DRP.

Tujuan dari IKU ini adalah mengukur kecepatan pemindahan sistem TIK dari DC ke DRC dalam rangka menjaga keberlangsungan sistem TIK pada saat terjadi bencana, sehingga proses bisnis Kementerian Keuangan yang didukung oleh sistem TIK tetap dapat berjalan dengan baik serta mendorong dan meningkatkan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Indeks keberhasilan switchover sistem TIK pada DC/DRC merupakan IKU mandatory untuk seluruh unit TIK di lingkup Kemenkeu. Pengukuran capaiannya berdasarkan keberhasilan switchover: 1) Kelengkapan DRP; 2) Kecepatan switchover dari DC ke DRC berdasarkan DRP; dan, 3) Lama sistem TIK beroperasi di DRC. Sistem TIK kritikal DJPb yang akan dilakukan *switchover* pada DC/DRC di tahun 2020, adalah :

1) Aplikasi SPAN (termasuk *Custom Web*)
2) Aplikasi e-Rekon&LK
3) Aplikasi OMSPAN
4) Aplikasi SAKTI

5) Aplikasi MPN-G3.

Realisasi capaian indeks keberhasilan switchover sistem TIK pada DC/DRC tahun 2020 adalah :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks keberhasilan switchover sistem TIK pada DC/DRC	85	93	120

Tindakan yang telah dilaksanakan guna mendukung Indikator kinerja di atas antara lain :

1. Kelengkapan dokumen BIA dan DRP untuk Aplikasi SPAN, OMSPAN, MPN G3, eRekon&LK dan SAKTI sebelum kegiatan *switchover* mulai dilaksanakan, telah selesai disusun.
2. Telah dilaksanakan kegiatan *switchover* Sistem TIK DJPb s.d. periode Triwulan IV 2020, yaitu :
   1) Aplikasi SPAN (termasuk *Custom Web*), pada tanggal 24-25 Juli 2020.
   2) Aplikasi MPN G3, pada tanggal 28-30 Agustus 2020.
   3) Aplikasi eRekon&LK, pada tanggal 9-13 Oktober 2020.
   4) Aplikasi OMSPAN, pada tanggal 27 November 2020.
   5) Aplikasi SAKTI, pada tanggal 27-28 November 2020.
3. Penyusunan dokumen DRP untuk Aplikasi SPAN, OMSPAN, MPN G3, eRekon&LK dan SAKTI setelah pelaksanaan *switchover* untuk disampaikan ke Pusintek.

SS 6. Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang kredibel

Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang kredibel harus memastikan perlindungan terhadap aspek-aspek : 1) *Confidentiality* (kerahasiaan), yaitu menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan disimpan; 2) *Integrity* (integritas), yaitu menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang (*authorized*), menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integrity ini; serta, 3) *Availability* (ketersediaan), yaitu menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait. IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2020 dan juga merupakan IKU *Mandatory* bidang TIK Kemenkeu.

Indikator utama dalam rangka pencapaian sasaran kinerja ini diwujudkan dalam indikator kinerja berikut :

10) IKU Indeks Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Isu utama dalam pelaksanaan indikator kinerja ini adalah :

1. IKU Indeks Implementasi Tata Kelola TIK : Indeks SMKI merupakan IKU mandatory tahun 2020 untuk unit TIK di lingkup Kemenkeu yang belum melaksanakan sertifikasi penerapan SMKI SNI ISO/IEC 27001:2013.
2. Pengukuran capaian melalui penilaian mandiri berdasarkan : 1) Penentuan klasifikasi/kategorisasi sistem elektronik; dan, 2) Penilaian mandiri atas seluruh klausul menggunakan kertas kerja Indeks SMKI.
3. Hasil penilaian mandiri tersebut selanjutnya disampaikan ke CIO Kemenkeu, Inspektorat VII Itjen, dan Pusintek, untuk dilakukan validasi oleh Itjen dan Pusintek.
4. Ruang lingkup penerapan SMKI di DJPb yang dilakukan reviu adalah Aplikasi SPAN yang termasuk kategori Sistem Elektronik Strategis;

5. Capaian IKU Indeks SMKI atau penerapan SMKI pada klausul persyaratan (ketentuan pokok) 1 s.d. 4 berdasarkan hasil reviu ITJEN adalah sebesar **4,07** (81%).

Realisasi capaian indeks SMKI lingkup Dit. SITP tahun 2020 adalah :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Sistem Manajemen Keamanan Informasi	3 (Skala 5)	4,07	120

Tindakan yang telah dilaksanakan guna mendukung Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. ITJEN telah menyampaikan Laporan Hasil Reviu Kedua Penilaian Mandiri Penerapan SMKI pada DJPb, dengan poin-poin sebagai berikut :
   1) Capaian IKU Indeks SMKI yang berfokus pada pemenuhan tahap perencanaan(Plan) pada pendekatan siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA) telah melampaui target yang ditetapkan (3 dari skala 5);
   2) Penerapan SMKI di DJPb belum sepenuhnya berjalan dengan pendekatan siklus PDCA, yang direpresentasikan oleh rata-rata capaian penerapan SMKI pada seluruh klausul persyaratan;
   3) Pengendalian keamanan informasi berjalan secara efektif pada sebagian area, yang direpresentasikan rata-rata capaian penerapan SMKI pada klausul kendali;
   4) Terdapat output ketentuan pokok SMKI berdasarkan KMK No. 942/KMK.01/2019 yang belum disusun;
   5) Proses sertifikasi SNI ISO/IEC 27001:2013 atas Aplikasi SPAN dapat dilaksanakan setelah seluruh klausul persyaratan SMKI terpenuhi dan klausul kendali dijalankan secara efektif guna memitigasi risiko dan mencapai sasaran SMKI.

SS 7. Layanan Pengguna dan media komunikasi yang responsif dan modern

Responsif berarti layanan pengguna dan media komunikasi dengan pengguna diarahkan untuk menghasilkan dukungan layanan dengan kualitas serta tingkat respon yang tinggi. Sisi manusia sebagai pintu pertama pelayanan permintaan pengguna didukung oleh sistem layanan pengguna yang modern, mampu mengoptimalkan teknologi yang tersedia dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pengguna. Inovasi pemberian layanan tidak hanya bermuara pada bagaimana pengguna didorong untuk dapat mengoptimalkan fitur yang tersedia guna menyelesaikan permasalahannya secara rnandiri (*shift left strategy*), akan tetapi sampai kepada analisis permasalahan yang berujung pada suatu sistem yang dapat memperkirakan potensi permasalahan (*incident-problem interception*).

Indikator utama dalam rangka pencapaian sasaran kinerja ini diwujudkan dalam indikator kinerja berikut :

11) IKU Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb

Isu utama yang muncul dalam pelaksanaan indikator kinerja ini adalah :

1. Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb pada Direktorat SITP untuk periode tahun 2020 adalah 3,87 dari target 3,2 (skala 4).
2. Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb pada Direktorat SITP diperoleh dari perhitungan : 1) Indeks kualitas layanan (diukur berdasarkan Survey kepuasan pengguna layanan HAI DJPb, yang dilakukan secara semesteran dan memiliki bobot 40%); dan, 2) Indeks ketepatan waktu penyelesaian tiket (diukur dengan berdasarkan persentase tiket yang diselesaikan tepat SLA

dibandingkan dengan seluruh tiket yang masuk dan memiliki bobot perhitungan sebesar 60%).

Realisasi capaian Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb pada Dit. SITP tahun 2020 adalah :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb	3,2 (Skala 4)	3,87 (Skala 4)	120

Tindakan yang telah dilaksanakan guna mendukung Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. Dari Aplikasi OMSPAN, Capaian IKU HAI DJPb untuk Kemenkeu-Two Dit. SITP Semester I adalah 3,86.

No	Dit	Ketepatan Waktu					Survei Kepuasan			Capaian IKU
		Jml Tiket	Tepat SLA	%	Indeks	Nilai	Hasil Survei	Indeks	Nilai	
1	SITP	41.223	39.790	96,52	4	2,4	91,24	3,65	1,46	3,86

2. Dari Aplikasi OMSPAN, Capaian IKU HAI DJPb untuk Kemenkeu-Two Dit. SITP Semester II adalah 3,88.

No	Dit	Ketepatan Waktu					Survei Kepuasan			Capaian IKU
		Jml Tiket	Tepat SLA	%	Indeks	Nilai	Hasil Survei	Indeks	Nilai	
1	SITP	38.037	37.166	97,71%	4	2,4	92,74	3,71	1,46	3,88

3. Sehingga rata-rata capaian IKU HAI DJPb untuk Kemenkeu-Two Dit. SITP tahun 2020 adalah : (3,86 + 3,88)/2 = **3,87**

SS 8. Peningkatan kapasitas *stakeholders* yang efektif

Tingkat pemahaman stakeholders terhadap arah pengembangan sistem informasi teknologi perbendaharaan adalah upaya untuk memberikan pemahaman kepada stakeholders mengenai pengembangan sistem informasi teknologi perbendaharaan yang mencakup penyempurnaan proses bisnis, koneksitas proses bisnis antar stakeholders, serta pengembangan sistem aplikasi perbendaharaan yang baru.

Indikator utama dalam rangka pencapaian sasaran kinerja ini diwujudkan dalam indikator kinerja berikut ini :

12) IKU Persentase tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

IKU ini mengukur keterpenuhan pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi yang dilakukan oleh seluruh PIC aplikasi, infrastruktur, tata kelola TIK dan topik terkait lainnya di lingkup Dit. SITP terhadap stakeholders yang terkait.

Indikator efektivitas kegiatan edukasi dan komunikasi dinilai dinilai berdasarkan tersedianya komponen-komponen yang harus disiapkan oleh PIC kegiatan, sebelum kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya :

1) Sosialisasi jadwal pelaksanaan kegiatan kepada stakeholders (Surat Undangan, Nota Dinas, dlsb.)
2) Materi/kurikulum training/pelatihan teknis/bimtek/sosialisasi (berupa slide, video, pdf, dlsb.);
3) Trainer yang ditunjuk (dedicated trainer);
4) Materi Pra-Test dan/atau Post-Test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta.

Isu utama yang muncul dalam pelaksanaan indikator kinerja ini, diantaranya :

1. Pengukuran capaian atas IKU Persentase tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi berdasarkan pemenuhan komponen pendukung penyelenggaraan kegiatan edukasi dan komunikasi, agar kegiatan tersebut dapat berjalan efektif, yaitu : 1) Sosialisasi jadwal pelaksanaan kegiatan kepada stakeholders (Surat Undangan, Nota DInas, dlsb.); 2) Materi/ kurikulum training/ pelatihan teknis/bimtek/sosialisasi (berupa slide, video, pdf, dlsb.); 3) Trainer yang ditunjuk (dedicated trainer); dan, 4) Materi Pra-Test dan/atau Post-Test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, apabila diperlukan.
2. Capaian diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh PIC aplikasi/narasumber di lingkup Dit. SITP kepada stakeholders internal dan eksternal Dit. SITP, berupa : sosialisasi, workshop, training, pelatihan, bimbingan teknis, melalui metode *classroom* maupun *video conference*)

Realisasi capaian Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pada Dit. SITP tahun 2020 adalah :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	100%	100%	100

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. Refreshment Training SAKTI Manajerial Tahun 2020 telah dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan peserta Kabid SKKI Kanwil dan Kepala KPPN.
2. EUT SAKTI Web Full Module untuk User SAKTI 7 satker dari 3 K/L peserta Piloting V, dengan materi terdiri dari : Modul Non Bendahara (tgl. 2- 6 November 2020), Modul Bendahara (tgl. 9-13 November 2020), Modul Persediaan (tgl. 16 - 20 November 2020), Modul Piutang GLP Pelaporan (tgl. 23 - 27 November 2020).
3. Sosialisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkup Kantor Pusat pada tgl. 3 Desember 2020 yang dilaksanakan secara online.

SS 9. Pengelolaan Sistem Informasi yang akuntabel dan transparan

Pengelolaan sistem informasi yang akuntabel dan transparan ikut berperan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat yang kredibel dan terpercaya. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, ketepatan waktu penyelesaian UU PP APBN, serta opini audit yang baik dari BPK.

Indikator utama dalam rangka pencapaian sasaran kinerja ini diwujudkan dalam indikator kinerja berikut :

13) IKU Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti

Isu utama yang muncul dalam pelaksanaan indikator kinerja ini adalah :

1. IKU Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti, merupakan IKU mandatory dari Kemenkeu-One DJPb untuk semua unit eselon II Kantor Pusat DJPb, dan unit eselon I lain yang terkait.
2. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai atau telah ditindaklanjuti terhadap rekomendasi BPK atas *action plan* dengan *timeframe* yang ditetapkan pemerintah.

3. Nilai capaian diperoleh melalui Direktorat APK, selaku UIC monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN.

Realisasi capaian penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti tahun 2020 adalah :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	89%	100%	120

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-6/PB.6/2020 Tanggal 6 Januari 2021 hal Penyampaian Capaian IKU Persentase Pengelolaan Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti Semester II Tahun 2020, capaian Semester II Dit. SITP adalah 100%, dengan perincian sebagai berikut :
   1) LKPP: Total Rekomendasi outstanding awal tahun = 5, rekomendasi selesai PTL SI 2020 = 0, rekomendasi diusulkan selesai = 3, capaian LKPP = 100%.
   2) LKBUN: Rekomendasi outstanding awal tahun = 0, rekomendasi selesai PTL SII 2019 = 0, rekomendasi diusulkan selesai = 2, capaian LKBUN = 100%.
   3) Capaian s.d. Semester II 2020 = **100%.**

SS 10. SDM yang Kompeten

SDM yang kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.

Indikator utama dalam rangka pencapaian sasaran kinerja ini diwujudkan dalam indikator kinerja sebagai berikut :

14) IKU Nilai rata-rata *hard competency* pegawai

Indikator kinerja ini adalah jumlah nilai penguasaan hard competency yang dicapai oleh pegawai dibagi dengan jumlah seluruh pegawai yang mengikuti test *hard competency* pegawai dengan nilai batas minimal ≥ 77.

Untuk tahun 2020, ruang lingkup soal-soal *hard competency* yang diujikan, tidak hanya terkait tupoksi masing-masing unit kerja eselon IV-nya saja, tetapi memasukkan soal-soal yang terkait dengan UU Keuangan Negara dan Budaya Organisasi DJPb.

Isu utama yang muncul dalam pelaksanaan indikator kinerja ini adalah :

1. Test Hard Competency dilaksanakan oleh seluruh pegawai pelaksana DJPBN untuk memperoleh nilai penguasaan terhadap hard competency.
2. IKU "Nilai rata-rata hard competency pegawai " merupakan jumlah nilai penguasaan hard competency yang dicapai oleh pegawai dibagi dengan jumlah seluruh pegawai yang mengikuti test HC tersebut.
3. Pelaksanaan ujian *Hard Competency* untuk Kantor Pusat DJPb diselenggarakan pada periode tgl. 6-8 Oktober 2020.
4. Jumlah pegawai Dit. SITP yang mengikuti tes *online Hard Competency* berjumlah 158 pegawai.

Realisasi capaian nilai rata-rata *hard competency* pegawai Dit. SITP tahun 2020 adalah :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai rata-rata *hard competency* pegawai	77	94,27	120

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan ujian *hard competency* (HC) oleh seluruh pegawai SITP pada tgl. 6-8 Oktober 2020, yang dikoordinasikan oleh Bagian SDM Sekretariat DJPb.
2. Pelaksanaan tes online *Hard Competency* diikuti oleh 158 pegawai Dit. SITP.
3. Diperoleh jumlah nilai tes secara keseluruhan = 14.894.
4. Sehingga nilai rata-ratanya adalah = (14.894/158) = **94,27.**

SS 11. Organisasi yang *Fit for Purpose*

Organisasi *Fit for Purpose* yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

Indikator utama dalam rangka pencapaian sasaran kinerja ini diwujudkan dalam beberapa indikator kinerja antara lain:

15) IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization (SFO)*

Isu utama yang muncul dalam pelaksanaan indikator kinerja ini adalah :

1. IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization (SFO) merupakan IKU mandatory DJPb, yang pengukurannya berdasarkan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja berdasarkan parameter : 1) Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2020 (Bobot 60%); dan, 2) Nilai NKO Unit periode tahunan 2019 (Bobot 40%).
2. Berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan No.KEP-303/PB/2020 tgl 30 Desember 2020 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di lingkungan DJPb tahun 2020, total nilai Dit. SITP adalah **91,12**.

Realisasi capaian nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis SFO tahun 2020 adalah :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization (SFO)*	83	91,12	120

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pengelolaan kinerja berbasis SFO yang telah dilakukan Dit. SITP dalam periode Triwulan IV 2020:
   1) Menyusun dan menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Two Direktorat SITP periode Triwulan III 2020;
   2) Menyusun dan menyampaikan *eBook* Laporan Progres Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat SITP Periode Triwulan III Tahun 2020;
   3) Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Direktorat SITP periode triwulan III tahun 2020;
   4) Pembahasan isu-isu strategis di lingkup Dit. SITP secara periodik, melalui acara Weekly Meeting Dit. SITP setiap Senin pagi, yang dipimpin langsung oleh Direktur SITP.
   5) Menyampaikan *Refinement* IKU Kemenkeu-*Two* s.d. *Five* Kanwil DJPb dan Kemenkeu-*Three* s.d. *Five* KPPN Tahun 2021.
   6) Menyampaikan *Refinement* Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Wide* Tahun 2021.
   7) Menyampaikan *Refinement* Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat SITP Tahun 2021.
   8) Menyampaikan *Refinement* IKU *mandatory* HAI-DJPb untuk IKU Kemenkeu-*Two* s.d. *Five* Kantor Pusat DJPb Tahun 2021.

16) IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Penilaian tersebut dilakukan oleh Setditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Kepatuhan Internal. Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen No. KEP-415/PB/2017 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanakan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas:

a) Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
b) Pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern (bobot: 35%)
c) Kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%)
d) Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

Isu utama yang muncul dalam pelaksanaan indikator kinerja ini adalah :

1. IKU Nilai hasil pelaksanaan tugas kepatuhan internal merupakan IKU mandatory DJPb, yang pengukurannya berdasarkan penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal, berdasarkan parameter : 1) Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%); 2) Pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern (bobot: 35%); 3) Kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%); 4) Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%).
2. Berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan No.KEP-304/PB/2020 tgl 30 Desember 2020 tentang Penetapan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di lingkungan DJPb tahun 2020, total nilai Dit. SITP adalah **90,01**.

Realisasi capaian nilai hasil pelaksanaan tugas kepatuhan internal tahun 2020 adalah :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	90,01	120

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut

:

Kegiatan yang dilaksanakan pada periode triwulan IV 2020 :

1. ND-1208/PB.8/2020 Tanggal 1 Desember 2020 tentang Penyampaian Dokumen Pemantauan Pengendalian Intern periode Bulan November 2020.
2. ND-1359/PB.8/2020 Tanggal 28 Desember 2020 tentang Penyampaian Dokumen Pemantauan Pengendalian Intern periode sampai dengan tgl. 20 Desember 2020.

SS 12. Pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal

Pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal adalah modernisasi teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung utama proses bisnis, harus mampu mendukung terciptanya peningkatan kinerja dan kemajuan bagi organisasi melalui pemanfaatannya secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adopsi dan pemanfaatan teknologi informasi akan cepat diterima di lingkup organisasi apabila memiliki karateristik : tingkat penggunaan yang mudah, memberi manfaat, dan memberi nilai tambah bagi organisasi.

Indikator utama dalam rangka pencapaian sasaran kinerja ini diwujudkan dalam indikator kinerja berikut ini :

17) IKU Persentase penyediaan fasilitas IoT untuk mendukung implementasi *smart office*

Internet of Things (IoT) adalah suatu konsep dimana objek tertentu memiliki kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, dimana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa adanya campur tangan manusia dan tanpa terbatas oleh jarak berapapun jauhnya, dengan menggunakan internet sebagai penghubung antara kedua interaksi mesin tersebut. Salah satu contoh penggunaan perangkat IoT, misalnya : alat yang dipakai untuk memantau dan mengontrol penggunaan energi di lingkungan kantor secara real-time untuk mengurangi konsumsi energi.

IKU ini mengukur pemenuhan ketersediaan fasilitas IoT di kantor Dit. SITP untuk mendukung implementasi konsep smart office dan green office.

Isu utama yang muncul dalam pelaksanaan indikator kinerja ini adalah :

1. IKU Persentase penyediaan fasilitas IoT untuk mendukung implementasi *smart office* merupakan IKU baru Kemenkeu-Two Dit. SITP tahun 2020, yang pengukurannya berdasarkan kepada penyelesaian target fasilitas IoT di kantor Dit. SITP.
2. IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, yang dapat menghasilkan interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan terbatas oleh jarak, karena menggunakan internet sebagai penghubung interaksi antar mesin tersebut
3. Target fasilitas IoT yang akan diselesaikan tahun 2020, adalah : 1) *Smart Door with Facial Recognition*; dan, 2) *Smart Energy Saver at* Dit. SITP's *Meeting Rooms*.
4. IoT *Smart Door with Facial Recognition* telah selesai dipasang dan difungsikan di pintu masuk Direktorat SITP lantai 2.
5. Pemasangan IoT *Smart Energy Saver at* Dit. SITP's *Meeting Rooms selesai* dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Dit. SITP lantai 2, dan telah dapat difungsikan dengan baik untuk mengontrol sistem kelistrikan di ruang rapat menggunakan *voice activation*.

Realisasi capaian IKU Persentase penyediaan fasilitas IoT untuk mendukung implementasi *smart office*

tahun 2020 adalah :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyediaan fasilitas IoT untuk mendukung implementasi *smart office*	80%	100%	120

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. IoT *Smart Door with Facial Recognition* telah selesai dipasang dan difungsikan di pintu masuk Direktorat SITP lantai 2.
2. IoT *Smart Energy Saver* telah selesai dipasang dan difungsikan di Ruang Rapat Utama Dit. SITP lantai 2 untuk mengontrol sistem kelistrikan menggunakan *voice activation*.

SS 13. Pengelolaan anggaran yang berkualitas

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Indikator utama dalam rangka pencapaian sasaran kinerja ini diwujudkan dalam indikator kinerja berikut ini :

18) IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Dit. SITP

Isu utama yang muncul dalam pelaksanaan indikator kinerja ini, diantaranya :

1. Timbulnya Pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan perubahan dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran. Periode triwulan IV 2020 masih dihadapkan dengan aturan PSBB dan fokus dalam mengatasi pandemi.
2. Sebagaimana disampaikan dalam ND Sesditjen No.ND-3070/PB.1/2020 tgl 6 Oktober 2020, bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Keuangan nomor ND-894/SJ.1/2020 tanggal 27 Juli 2020 hal Evaluasi Kinerja Anggaran Semester I dan Pelaksanaan Anggaran Semester II lingkup Bagian Anggaran 015 Kementerian Keuangan, relaksasi perhitungan IKU PKPA dinyatakan dicabut, sehingga mulai periode Triwulan III 2020 dilakukan penilaian kembali. Namun demikian, sesuai Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan nomor ND-562/PB/2020, Perhitungan IKPA mulai Triwulan III ini tidak menghitung komponen Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.
3. Untuk penyelesaian pekerjaan kontraktual telah sesuai jadwal, dan telah dilakukan penyelesaian hingga proses pencairan dana. Namun, untuk kegiatan yang bersifat pertemuan hanya bisa dilaksanakan secara terbatas dengan protokol kesehatan yang berlaku.
4. Melanjutkan kebijakan triwulan sebelumnya, dilakukan revisi dan penyesuaian alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan yang masih dapat diselenggarakan dalam kondisi pandemi covid-19, seperti konsinyering secara terbatas untuk keperluan koordinasi kelancaran operasional sistem akhir tahun 2020 dan melakukan setup sistem untuk tahun 2021, serta optimalisasi sisa kontrak pada belanja modal.

Realisasi capaian persentase kualitas pelaksanaan anggaran DIT.SITP tahun 2020 adalah :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran DIT.SITP	95%	95%	100

Tindakan yang telah dilaksanakan guna mendukung Indikator kinerja di atas antara lain:

INDIKATOR IKU		BOBOT	NILAI	HASIL
A. NILAI IKPA		NORMAL		
1	Realisasi anggaran	15%	100.00%	15.00%
2	Halaman III DIPA	0%	0.00%	0.00%
3	Revisi DIPA	0%	0.00%	0.00%
4	Penyelesaian Tagihan	12%	100.00%	12.00%
5	Data kontrak	15%	86.00%	12.90%
B. NILAI SMART				
TOTAL		42.00%	286.00%	39.90%
NILAI CAPAIAN IKU PKPA		95.00%		

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2020 dari pagu anggaran DIPA Satker Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Rp116.326.294.000 telah direalisasikan sebesar Rp115.203.657.308 dan DIPA Satker SPAN Rp37.048.044.000 telah direalisasikan sebesar 36.797.378.282 dengan rincian sebagai berikut :

No	DIPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sumber Dana
1	Satker Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan	116.326.294.000	115.203.657.308	99,03	RM
No	**DIPA**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**%**	**Sumber Dana**
2	Satker SPAN	37.048.044.000	36.797.378.282	99,32	RM
Jumlah		153.374.338.000	152.001.035.590	99,10	

C. Kinerja Lainnya

Berikut adalah beberapa capaian berupa inovasi manajemen/ pelayanan dan penghargaan yang diperoleh Dit. SITP pada tahun 2020 :

1. Capaian HAI-DJPb pada Lomba The Best Contact Center Indonesia 2020 dan Lomba Top Ranking Permormers Awards 2020 tingkat Asia Pasifik

Pada tahun 2020, HAI-DJPb mewakili Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengikuti 2 (dua) ajang kompetisi di bidang penyelenggaraan contact center yaitu:

1. Lomba The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association; dan,

2. Lomba Top Ranking Performance Awards (TRPA) tahun 2020 tingkat Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Contact Center World.

Atas keikutsertaan HAI-DJPb dalam kedua ajang tersebut, HAI-DJPb memperoleh beberapa medali kemenangan, diantaranya:

a) Medali Emas untuk kategori Korporat – *The Best Technology Innovation* dengan presenter M. Ali Hanafiah pada ajang TBCCI;
b) Medali Perak untuk kategori Individu – *Best of the Best Back Office Agent* dengan peserta M. Aditya Bakry pada ajang TBCCI;
c) Medali Perak untuk kategori Individu – *Back Office Agent* dengan peserta Haekal B. Yusuf pada ajang TBCCI;
d) Medali Perak untuk kategori Individu – *IT Support* dengan peserta Ahmad Sahrizal pada ajang TBCCI; dan
e) Medali Emas untuk kategori *The Best Public Services Center – Government* dengan presenter M. Ali Hanafiah pada ajang TRPA.

Atas Medali Emas yang diperoleh di ajang Top Ranking Performance Awards (TRPA) tahun 2020 tingkat Asia Pasifik, HAI-DJPb berkesempatan untuk melanjutkan capaiannya di tingkat dunia pada ajang Top Ranking Performers Awards tahun 2020 – World Finals, yang direncanakanakan diselenggarakan pada bulan Februari 2021, dimana HAI-DJPb akan bersaing dengan juara dari wilayah Amerika, wilayah Eropa,Timur Tengah, dan Afrika.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh pimpinan Ditjen Perbendaharaan dan juga seluruh agent HAI-DJPb di kantor pusat maupun CSO KPPN melalui pemanfaatan aplikasi HAI-CSO. Melalui keberhasilan ini kami berharap agar HAI-DJPb dapat senantiasa memberikan layanan terbaiknya kepada pengguna serta mampu mempersembahkan lebih banyak penghargaan bagi Direkotrat Jenderal Perbendaharaan di masa-masa yang akan datang.

Dokumentasi penghargaan Lomba The Best Contact Center Indonesia 2020 dan
Lomba Top Ranking Permormers Awards 2020 tingkat Asia Pasifik

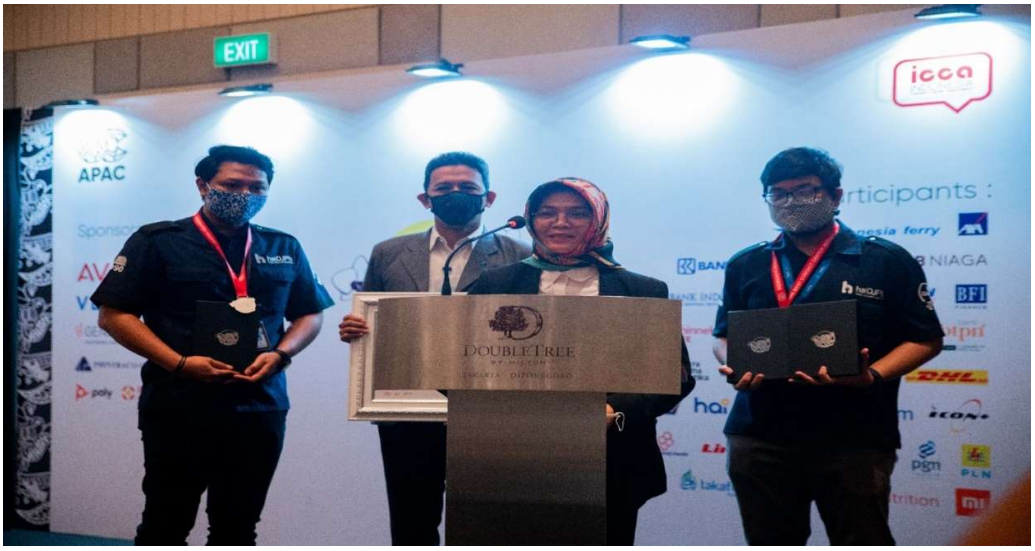

THE BEST CONTACT CENTER INDONESIA 2020
CERTIFICATE
Awarded to
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENKEU
as the winner of
THE BEST TECHNOLOGY INNOVATION
GOLD
Jakarta, 20 November 2020
Andi Anugrah
Chairman
Reg. No. : 20.043.358.3
Score : 84,66

EXIT
APAC

GOLD WINNER
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT
in the 2020 Global Top Ranking Performers Awards
15th Annual Best in Asia Pacific
THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO
Directorate General of Treasury
FOR
Best Public Services Center
President
Raj Wadhwani
CONTACT CENTER WORLD

2. Penghargaan Top Digital Implementation, DJPb Unggulkan Aplikasi Pengelolaan APBN

Ditjen Perbendaharaan meraih penghargaan *Top Digital Implementation* 2020 on Institution Sector, Level Stars 4, dari majalah It Works. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Saiful Islam mewakili Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto menerima penghargaan tersebut dalam kegiatan penganugerahan yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 22 Desmeber 2020.

Penghargaan tersebut diperoleh berdasarkan keberhasilan DJPb dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan APBN, melalui implementasi 3 (tiga) aplikasi utama (SPAN, SAKTI dan MPN-G3) DJPb - yang memiliki dampak besar buat masyarakat.

1. Dari sisi pendapatan, MPN-G3 berkontribusi terhadap settlement penerimaan negara baik pajak maupun bukan pajak;
2. Dari sisi pengeluaran, SPAN yang sudah di-launch dari 2015, membantu Menteri Keuangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara; dan,
3. Dari sisi pengelolaan keuangan negara tingkat satuan kerja, SAKTI yang saat ini sudah implementasi piloting tahap 5, telah membantu Kementerian dan Lembaga dalam proses pengelolaan keuangan negara.

Di samping itu, penilaian juga mempertimbangkan sisi keamanan informasi DJPb yang selalu disiapkan, serta peran HAI-DJPb dan HAI-CSO yang selalu siaga dalam memberikan layanan kepada pengguna. Dalam kesempatan tersebut, Direktur SITP juga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Top Leader on Digital Implementation 2020.

Dalam ajang penghargaan ini, panitia penyelenggara tidak hanya memberikan penghargaan, namun juga mengungkapkan sejumlah tantangan kepada DJPb untuk dapat meningkatkan kinerja implementasi teknologi digital yang sudah diterapkan. Termasuk perlunya pemerintah pusat menggunakan sistem informasi yang terinterkoneksi dengan pemerintah daerah.

Dokumentasi penghargaan *Top Digital Implementation* 2020 *on Institution Sector, Level Stars 4*, dari majalah It Works

PEMENANG TOP DIGITAL AWARDS 2020
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NEGARA (DJPB)
TOP DIGITAL Implementation 2020 on Institution Sector # Level Stars 4
TOP Leader on Digital Implementation 2020

PEMENANG TOP DIGITAL AWARDS 2020
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NEGARA (DJPB)
TOP DIGITAL Implementation 2020 on Institution Sector # Level Stars 4
TOP Leader on Digital Implementation 2020
Saiful Islam - Direktur Sistem Informasi & Teknologi

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan tahun 2020 menyajikan capaian kinerja yang dicapai oleh Direktorat SITP pada tahun 2020 dan dapat dilihat pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja. Secara umum, sasaran kinerja tahun 2020 menunjukkan suatu keberhasilan yang dapat dilihat dengan tercapainya seluruh target indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditentukan sesuai dengan kontrak kinerja di Kemenkeu *Two*.

Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan amanah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan, bersyukur karena di penghujung tahun 2020 target-target yang menjadi isu utama pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan di Kementerian Keuangan telah dapat dilaksanakan. Begitu juga dengan IKU yang menjadi *mandatory* bidang TIK Kemenkeu serta IKU yang menjadi *cascading Kemenkeu-Wide* yang seluruhnya dapat dicapai targetnya.

Disisi lain pada tingkat pelaksanaan kebijakan menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih diperlukan improvement di tahun 2021, serta peningkatan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari seluruh pihak baik internal maupun eksternal Dit. SITP. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama secara sinergi dengan berbagai instansi di pusat maupun di kantor vertikal harus dilakukan dengan intensif mengingat capaian indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan seluruh instansi terkait. Hal ini sebagai bagian dari upaya melaksanakan amanah reformasi Keuangan Negara serta Reformasi Birokrasi di tubuh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan pada umumnya serta mendukung visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia.

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

KONTRAK KINERJA
NOMOR: 8 /PB/2020

DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi

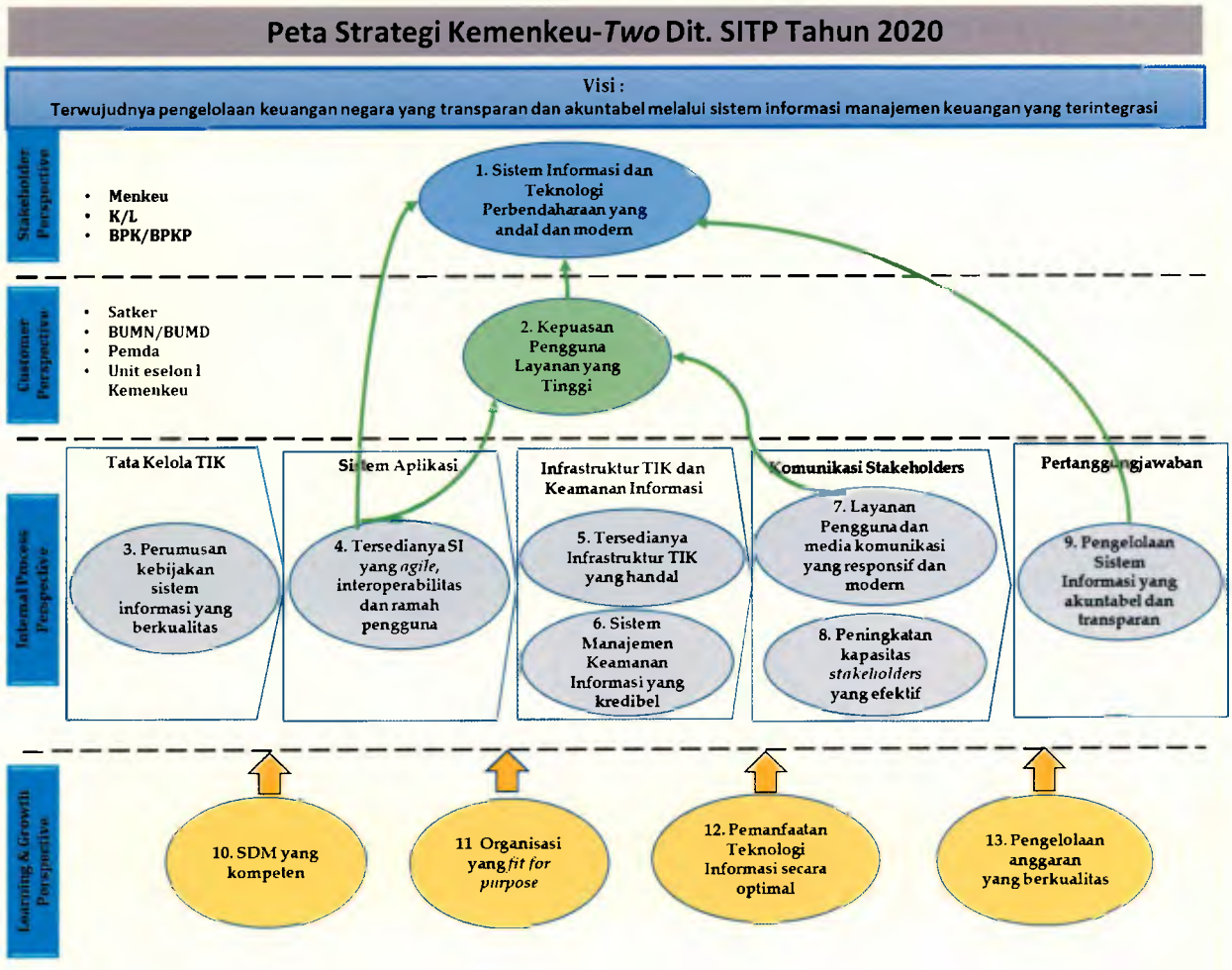

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang andal dan modern	1a-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
2.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	2a-N	Indeks kepuasan publik atas layanan Dit. SITP	4,52 (skala 5)
3.	Perumusan Kebijakan Sistem Informasi yang berkualitas	3a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian kebijakan sistem informasi	4,5 (skala 5)
		3b-N	Persentase Pemenuhan Rekomendasi Hasil Audit Tata Kelola TIK berdasarkan Cobit 5.0	80%
4.	Tersedianya Sistem Informasi yang *agile*, interoperabilitas dan ramah pengguna	4a-N	Persentase tingkat penyempurnaan aplikasi perbendaharaan	100%
		4b-N	Persentase implementasi interkoneksi aplikasi perbendaharaan	80%
		4c-N	Persentase tingkat pemenuhan dokumen *Release Management*	100%
5.	Tersedianya infrastruktur TIK yang handal	5a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	TBA
		5b-N	Indeks keberhasilan *switchover* sistem TIK pada DC/DRC	85
6.	Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang kredibel	6a-N	Indeks Implementasi Tata Kelola TIK : Indeks SMKI	3 (skala 5)
7.	Layanan Pengguna dan media komunikasi yang responsif dan modern	7a-N	Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb	3 (skala 4)
8.	Peningkatan kapasitas stakeholders yang efektif	8a-N	Persentase tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	100%
9.	Pengelolaan Sistem Informasi yang akuntabel dan transparan	9a-N	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	89%
10.	SDM yang kompeten	10a-N	Nilai rata-rata *hard competency* pegawai	77
11.	Organisasi yang *fit for purpose*	11a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization (SFO)*	83

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		11b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
12.	Pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal	12a-N	Persentase penyediaan fasilitas IoT untuk mendukung implementasi *smart office*	80%
13.	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	13a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Dit. SITP	95%

Kegiatan
Pengembangan Sistem Perbendaharaan

Anggaran
Rp142.520.356.000

Jakarta, Januari 2020

Direktur Jenderal Perbendaharaan,

Andin Hadiyanto
NIP 196506091990121001

Direktur Sistem Informasi
dan Teknologi Perbendaharaan,

Saiful Islam
NIP 196804201988111001

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Andin Hadiyanto	1	Nama	Saiful Islam
2	NIP	196506091990121001	2	NIP	196804201988111001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama/ IV/e	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya/ IV/c
4	Jabatan	Direktur Jenderal	4	Jabatan	Direktur
5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	5	Unit Kerja	Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1.	Menyelesaikan implementasi Aplikasi SAKTI		100%	100	12 bulan	
2.	Memenuhi kepuasan publik atas layanan Dit. SITP		4,52 (skala 5)	100	12 bulan	
3.	Memenuhi ketepatan waktu penyelesaian kebijakan sistem informasi		4,5 (skala 5)	100	12 bulan	
4.	Memenuhi Rekomendasi Hasil Audit Tata Kelola TIK berdasarkan Cobit 5.0		80%	100	12 bulan	
5.	Menyelesaikan penyempurnaan aplikasi perbendaharaan		100%	100	12 bulan	
6.	Menyelesaikan implementasi interkoneksi aplikasi perbendaharaan		80%	100	12 bulan	
7.	Memenuhi penyusunan dokumen *Release Management*		100%	100	12 bulan	
8.	Mewujudkan keberhasilan *switchover* sistem TIK pada DC/DRC		85	100	12 bulan	
9.	Melaksanakan pengelolaan sistem TIK yang berkualitas		TBA	100	12 bulan	
10.	Memenuhi Indeks Implementasi Tata Kelola TIK : Indeks SMKI		3 (skala 5)	100	12 bulan	
11.	Memenuhi Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb		3 (skala 4)	100	12 bulan	

12.	Mewujudkan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi		100%	100	12 bulan	
13.	Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN		89%	100	12 bulan	
14.	Mewujudkan nilai rata-rata *hard competency* pegawai yang baik		77	100	12 bulan	
15.	Mewujudkan pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization (SFO)*		83	100	12 bulan	
16.	Memenuhi nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal		83	100	12 bulan	
17.	Menyediakan fasilitas IoT untuk mendukung implementasi *smart office*		80%	100	12 bulan	
18.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran Dit. SITP		95%	100	12 bulan	Rp142M

Jakarta, Januari 2020

Pejabat Penilai,

Andin Hadiyanto
NIP 196506091990121001

PNS yang dinilai,

Saiful Islam
NIP 196804201988111001

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

1a-CP

Perspektif : *Stakeholders Perspective*

Sasaran Strategis : **1. Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang Andal dan Modern**

Deskripsi Sasaran Strategis :

Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang andal dan modern adalah sistem informasi terintegrasi yang mengelola dan mengolah berbagai jenis input data dan informasi (*resources*) keuangan menjadi hasil keluaran (*output*) *real time* data dan informasi keuangan yang konsisten dalam rangka membantu para pengambil kebijakan pada unit-unit organisasi lingkup Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Sistem informasi ini didukung oleh teknologi informasi yang mutakhir, tepat guna, *secure*, terjaga tingkat operasionalnya, mudah dioperasikan dan sesuai kebutuhan pengguna berdasarkan standar dan kaidah tata kelola TIK yang baik, serta dapat memberikan nilai tambah yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan DJPb sebagai pengelola perbendaharaan yang memliki reputasi unggul tingkat dunia.

Indikator Kinerja Utama: **1a-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI**

Deskripsi IKU:

Definisi :

Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI mengukur tingkat pemenuhan pelaksanaan kegiatan-kegiatan utama implementasi Aplikasi SAKTI tahun 2020 oleh *Unit In Charge* (UIC) di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, sebagaimana daftar di bawah ini. Implementasi SAKTI tahun 2020 mencakup implementasi SAKTI pada satuan kerja Kementerian/ Lembaga yang telah ditetapkan dalam KMK Implementasi SAKTI tahun 2020.

Kegiatan Utama Implementasi SAKTI	Unit In Charge
1. Training dan Pelatihan SAKTI	Subdit PTTI, Subdit PSIE
2. Pengembangan Aplikasi SAKTI	Subdit PSIE
3. Pembuatan dan Penyebaran Media Komunikasi	Subdit PTTI
4. Penyusunan Peraturan/Kebijakan	Subdit PTTI
5. Implementasi Operasional Aplikasi SAKTI	Subdit PSIE
6. Dukungan Infrastruktur	Subdit PTTI

Masing-masing kegiatan utama tersebut terdiri dari milestone-milestone yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu oleh unit utama dan unit pendukung kegiatan, yang selanjutnya masing-masing progres pencapaiannya dihitung melalui formula di bawah ini.

Formula :

$$= \sum(Ci \times 100\%)+(Mj \times 60\%) / \sum(i \times 100\%) +(j \times 60\%)$$

C = Capaian Kegiatan Utama UIC; M = Capaian Milestone UIC pada Kegiatan Kontribusi (apabila ada); i = Kegiatan Utama; j = Kegiatan Kontribusi

Tujuan:

Memonitor dan memastikan implementasi Aplikasi SAKTI tahun 2020 terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Satuan Pengukuran: **Persentase (%)**

Jenis Aspek Target : **(X) Kuantitas** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU : ( ) High **(X) Moderate** ( ) Low

Tingkat Validitas IKU : ( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggungjawab IKU : Subdit PTTI, Subdit PSIE

Unit/Pihak Penyedia Data : Subdit PTTI, Subdit PSIE

Sumber Data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Implementasi SAKTI tahun 2020 dari Dit. SITP

Jenis Cascading IKU : **(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading/Complement

Metode Cascading : **(X) Direct** ( ) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: ( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**

Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( ) Average **(X) Raw data**

Polarisasi: **(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize

Periode Pelaporan: ( ) Bulanan ( ) Triwulanan **(X) Semesteran** ( ) Tahunan

Konversi 120 : ( ) Ya **(X) Tidak**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020
	target	realisasi	target	realisasi	target
Triwulan I	-	-	-	-	-
Triwulan II	30%	50%	30%	30%	30%

Triwulan III	-	32,5%	-		-
Triwulan IV	100%	82,5%	100%	100%	100%
Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%

Kertas Kerja Perhitungan Capaian Implementasi SAKTI Tahun 2020

No	Task	Start	End	Unit Utama	Durasi	Bobot tertimbang	Realisasi (Progres Milestone)	Capaian
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Kegiatan Utama - Milestone					**100%**	**%**	**(G X H)%**
I	**TRAINING DAN PELATIHAN SAKTI (DIT. SITP)**							
	Milesone :							
1	Pendampingan Piloting SAKTI pada 5 K/L (20 satker)	01-Jan-20	29-Feb-20	SITP	59	13.23%	0%	0.00%
2	ToT SAKTI Web Modul Admin dan Modul Anggaran untuk DJA	01-Jan-20	29-Feb-20	SITP	59	13.23%	0%	0.00%
3	Refreshment ToT SAKTI 5 K/L	01-Feb-20	31-Mar-20	SITP	59	13.23%	0%	0.00%
4	FGD Strategi Implementasi SAKTI Web pada K/L tahun 2020	01-Jun-20	30-Jun-20	SITP	29	6.50%	0%	0.00%
5	Refreshment ToT SAKTI Web dan pendampingan RKAKL 2021 semua KL	01-Aug-20	30-Sep-20	SITP	60	13.45%	0%	0.00%
6	Refreshment Training SAKTI untuk KPPN dan Kanwil	01-Aug-20	30-Sep-20	SITP	60	13.45%	0%	0.00%
7	Refreshment Training SAKTI Manajerial untuk KPPN dan Kanwil	01-Oct-20	30-Nov-20	SITP	60	13.45%	0%	0.00%
8	**EUT SAKTI *Web Full Module* Piloting SAKTI Tahap V** (3 K/L)	01-Oct-20	30-Nov-20	SITP	60	13.45%	0%	0.00%
					446	**100%**		**0.00%**
II	**PENGEMBANGAN APLIKASI SAKTI**							
	Milesone :							
1	Pengembangan Redesign Anggaran	01-Jan-20	30-Apr-20	SITP	120	100.00%	0%	0.00%
					120	**100%**		**0.00%**
III	**PEMBUATAN DAN PENYEBARAN MEDIA KOMUNIKASI**							
	Milesone :							
1	Pembuatan Panduan Penyelenggaraan Training SAKTI Web untuk K/L	01-Apr-20	30-Jun-20	SITP	90	19.82%	0%	0.00%
2	Penerbitan flyer (2 kali), standing banner, dan media komunikasi lainnya	01-Jan-20	30-Jun-20	SITP	181	39.87%	0%	0.00%
3	Penerbitan flyer (2 kali), standing banner, dan media komunikasi lainnya	01-Jul-20	31-Dec-20	SITP	183	40.31%	0%	0.00%
					454	**100%**		**0.00%**
IV	**PENYUSUNAN PERATURAN/ KEBIJAKAN**							
	Milesone :							
1	Penetapan **Exit Criteria Piloting SAKTI Tahap IV** melalui Kepdirjen Perbendaharaan	01-Aug-20	30-Sep-20	SITP	60	39.74%	0%	0.00%
2	**Penyusunan Rancangan PMK Implementasi SAKTI 2020**	01-Jul-20	30-Sep-20	SITP	0	0.00%	**N/A**	
3	**Penyusunan Rancangan KMK Implementasi SAKTI 2020**	01-Oct-20	31-Dec-20	SITP	91	60.26%	0%	0.00%
					151	**100%**		**0.00%**
V	**IMPLEMENTASI APLIKASI SAKTI**							
	Milesone :							
1	Penyelesaian Pendaftaran email kedinasan bagi satker K/L	01-Jan-20	31-Mar-20	SITP	90	11.46%	0.00%	0.00%
2	Set up konfigurasi satker dan pendaftaran user SAKTI Web	01-Jan-20	31-Mar-20	SITP	90	11.46%	0.00%	0.00%
3	Pendampingan Migrasi Saldo awal SAKTI tahun 2020 (untuk 5 K/L)	01-Mar-20	30-Jun-20	SITP	121	15.41%	0.00%	0.00%
4	Pendampingan penyelesaian Revisi DIPA 2020 (Modul Anggaran)	01-Jan-20	30-Jun-20	SITP	181	23.06%	0.00%	0.00%
5	Pendampingan penyelesaian Revisi DIPA 2020 (Modul Anggaran)	01-Jul-20	31-Dec-20	SITP	183	23.31%	0.00%	0.00%
6	**Pendampingan penyusunan RKA KL/DIPA 2021**	01-Oct-20	30-Nov-20	SITP	60	7.64%	0%	0.00%
7	Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Semester I 2020 (dengan SAKTI) (7 K/L)	01-Jul-20	31-Jul-20	SITP	30	3.82%	0%	0.00%
8	**Pendampingan persiapan Gaji Januari 2021**	01-Dec-20	31-Dec-20	SITP	30	3.82%	0%	0.00%
					785	**100%**		**0.00%**
VI	**DUKUNGAN INFRASTRUKTUR**							
	Milesone :							
1	Penyelesaian penyediaan akses internet satker K/L oleh BLU BAKTI	01-Jan-20	31-Mar-20	SITP	90	75.63%	0.00%	0.00%
2	Penyediaan Server Training SAKTI	01-Apr-20	30-Apr-20	SITP	29	24.37%	0%	0.00%
					119	**100%**		**0.00%**

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

2a-N

Perspektif :	*Customer Perspective*
Sasaran Strategis :	**2. Kepuasan Pengguna Layanan yang tinggi**
Deskripsi Sasaran Strategis :	Kepuasan Pengguna Layanan yang tinggi adalah pelayanan kepada *stakeholders* yang mengutamakan aspek peningkatan dan perbaikan layanan yang inovatif dan berkelanjutan mencakup indikator *tangible, reliability, responsiveness, assurance* dan *empathy.*
Indikator Kinerja Utama:	**2a-N Indeks Kepuasan Publik atas Layanan Dit. SITP**
Deskripsi IKU:	**Definisi:** Indeks kepuasan publik atas layanan Dit. SITP adalah indeks yang mengukur persepsi pengguna/user layanan Sistem Informasi dan Teknologi (SIT) terhadap ketersediaan, kehandalan, fungsionalitas, keamanan sistem data serta dukungan layanan pengguna (helpdesk/call center) atas layanan SIT Dit. SITP. Respon pengguna tersebut dituangkan dalam bentuk penilaian atas Survei Tingkat Kepuasan User terhadap Implementasi Sistem Informasi dan Teknologi DJPb yang dilakukan setahun sekali. Dimensi layanan pengguna utama yang dijadikan sebagai basis penilaian survei adalah: *Information Quality, System Quality, Service Quality, User Satisfaction, Net Benefit* atas layanan SIT Dit. SITP . **Formula:** $\frac{\sum \text{(Skor rataan penilaian kinerja)}}{\text{Jumlah responden pengguna}} \times 100\%$ **Tujuan:** Mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari pengguna/*user* SIT atas kinerja ketersediaan, kehandalan, fungsionalitas, keamanan sistem data serta dukungan layanan pengguna yang disediakan oleh Dit. SITP, serta sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pimpinan di Ditjen Perbendaharaan, dalam menentukan kebijakan peningkatan pengembangan sistem informasi dan teknologi perbendaharaaan/ keuangan negara pada tahap selanjutnya.
Satuan Pengukuran:	Indeks
Jenis Aspek Target :	( ) Kuantitas **(X) Kualitas** ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU :	( ) High ( ) Moderate **(X) Low**
Tingkat Validitas IKU :	**(X) Exact** ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggungjawab IKU:	Subdit PTTI
Unit/Pihak Penyedia Data:	Subdit PTTI
Sumber Data:	Survei Tingkat Kepuasan User terhadap Implementasi Sistem Informasi dan Teknologi DJPb Tahun 2020
Jenis Cascading IKU :	( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta **(X) Non Cascading/Complement**
Metode Cascading :	**(X) Direct** ( ) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode:	( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum ( ) Average **(X) Raw data**
Polarisasi :	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**
Konversi 120 :	( ) Ya **(X) Tidak**

Tabel Data

Periode Pelaporan	2018		2019		2020
	target	realisasi	target	realisasi	target
Triwulan I	-	-	-	-	-
Triwulan II	-	-	-	-	-
Triwulan III	-	-	-	-	-
Triwulan IV	4,52	4,72	4,52	4,64	4.52
Tahunan	4,52 (skala 5)	4,72	4,52 (skala 5)	4,64	4.52 (skala 5)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

3a-N

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : **3. Perumusan Kebijakan Sistem Informasi yang berkualitas**

Deskripsi Sasaran Strategis :

Perumusan Kebijakan Sistem Informasi yang berkualitas adalah penyusunan kebijakan dan standar yang terkait dengan bidang pengembangan aplikasi, keamanan informasi, pengelolaan infrastruktur, proses bisnis IT, dan tata kelola TIK, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan TIK dan layanan IT di lingkungan Dit. SITP, sehingga dapat sesuai dengan standar umum yang berlaku (ISO) di bidang IT. Penyusunan kebijakan dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya : penyesuaian atas perubahan standar internasional (ISO); perubahan proses bisnis; rekomendasi hasil audit atau assesmen sistem informasi, serta pemenuhan kebutuhan pengguna layanan sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.

Indikator Kinerja Utama: **3a-N Indeks ketepatan waktu penyelesaian kebijakan sistem informasi**

Deskripsi IKU:

Definisi:

Indeks ketepatan waktu penyelesaian kebijakan sistem informasi mengukur ketepatan waktu proses penyelesaian peraturan (dalam bentuk Kepdirjen Perbendaharaan, Perdirjen Perbendaharaan, atau Keputusan CIO DJPb) yang berkaitan dengan kebijakan teknis dan standar sistem informasi. Proses penyelesaian meliputi : penyusunan rancangan peraturan, proses pembahasan, final rancangan peraturan, sampai dengan penetapan oleh pejabat yang berwenang.
Indeks ketepatan waktu penyelesaian kebijakan sistem informasi, diukur dengan menggunakan 2 (dua) komponen, yaitu : Indeks kualitas penyelesaian rancangan (sebagai capaian IKU semester I) dan Indeks kualitas penetapan peraturan (sebagai capaian IKU semester II).

TABEL A. Target Kebijakan Sistem Informasi tahun 2020 :

No	Materi Kebijakan	Target Waktu Penyelesaian		PIC Subdit
		Rancangan	Penetapan	
1	Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan	Jun-20	Dec-20	**PTTI**
2	Pedoman Penyelenggaraan Layanan HAI DJPb	Jun-20	Dec-20	**PSIE**

A. Indeks Kualitas Penyelesaian Rancangan, untuk perhitungan capaian Semester I :

Penyelesaian Rancangan adalah persentase jumlah materi kebijakan yang telah diselesaikan menjadi rancangan peraturan sesuai batas waktu, dibandingkan dengan jumlah materi kebijakan yang direncanakan, sesuai target waktu dalam Tabel A.

$$x = \frac{\sum Materi\ Kebijakan\ yang\ diselesaikan\ menjadi\ rancangan\ sesuai\ batas\ waktu}{\sum Materi\ Kebijakan\ yang\ direncanakan} \text{ x } 100\%$$

Untuk menghitung Indeks Kualitas Penyelesaian Rancangan, hasil perhitungan tersebut, dikonversikan menjadi indeks capaian, melalui range indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan kebijakan, sebagai berikut:
Indeks 1 : 0 ≤ x ≤ 20% Rancangan kebijakan diselesaikan sesuai batas waktu
Indeks 2 : 20% < x ≤ 40% Rancangan kebijakan diselesaikan sesuai batas waktu
Indeks 3 : 40% < x ≤ 65% Rancangan kebijakan diselesaikan sesuai batas waktu
Indeks 4 : 60% < x ≤ 80% Rancangan kebijakan diselesaikan sesuai batas waktu
Indeks 5 : 80% < x ≤ 100% Rancangan kebijakan diselesaikan sesuai batas waktu

B. Indeks Kualitas Penetapan Peraturan, untuk perhitungan capaian Semester II :

Penetapan Peraturan adalah persentase jumlah rancangan peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai batas waktu, dibandingkan dengan jumlah rancangan peraturan yang diusullkan, sesuai target waktu dalam Tabel A.

$$x = \frac{\sum Rancangan\ peraturan\ yang\ ditetapkan\ oleh\ pejabat\ berwenang\ sesuai\ batas\ waktu}{\sum Rancangan\ peraturan\ yang\ diusulkan} \text{ x } 100\%$$

Untuk menghitung Indeks Kualitas Penetapan Peraturan, hasil perhitungan tersebut, dikonversikan menjadi indeks capaian, melalui range indeks ketepatan waktu penetapan peraturan, sebagai berikut:
Indeks 1 : 0 ≤ x ≤ 20% Rancangan peraturan ditetapkan sesuai batas waktu
Indeks 2 : 20% < x ≤ 40% Rancangan peraturan ditetapkan sesuai batas waktu
Indeks 3 : 40% < x ≤ 65% Rancangan peraturan ditetapkan sesuai batas waktu
Indeks 4 : 60% < x ≤ 80% Rancangan peraturan ditetapkan sesuai batas waktu
Indeks 5 : 80% < x ≤ 100% Rancangan peraturan ditetapkan sesuai batas waktu

Formula:

Rata-rata (∑(Indeks Kualitas Penyelesaian Rancangan) + (Indeks Kualitas Penetapan Peraturan))

Tujuan:

Tersedianya kebijakan dan standar sistem informasi sebagai sumber pengaturan dalam pengelolaan sistem informasi di lingkungan DJPb.

Satuan Pengukuran: Indeks

Jenis Aspek Target : ( ) Kuantitas **(X) Kualitas** ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU : ( ) High **(X) Moderate** ( ) Low

Tingkat Validitas IKU : ( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggungjawab IKU: Subdit PTTI, Subdit PSIE

Unit/Pihak Penyedia Data: Subdit PTTI, Subdit PSIE

Sumber Data: Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan, Rencana Strategi TIK Kementerian Keuangan, Rencana Strategi Ditjen Perbendaharaan, Rekomendasi IS Audit SPAN (Cobit 5) tahun 2017, Policy Recommendation Itjen.

Jenis Cascading :	( ) Cascading Peta	( ) Cascading Non Peta	**(X) Non Cascading/Complement**
Metode Cascading:	( ) *Direct*	**(X) *Indirect***	
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum	**(X) Average**	( ) Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum	( ) Average	**(X) Raw data**
Polarisasi :	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	**(X) Semesteran** ( ) Tahunan
Konversi 120:	( ) Ya	**(X) Tidak**	

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2018		2019		2020
	target	realisasi	target	realisasi	target
Triwulan I	-	-	-	-	-
Triwulan II	4	5	4,25	5	4,5
Triwulan III	-	-	-	-	-
Triwulan IV	4	5	4,25	5	4,5
Tahunan	4 (skala 5)	5	4,25 (skala 5)	5	4,5 (skala 5)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

3b-N

Perspektif :	*Internal Process Perspective*
Sasaran Strategis :	**3. Perumusan Kebijakan Sistem Informasi yang berkualitas**
Deskripsi Sasaran Strategis :	Perumusan Kebijakan Sistem Informasi yang berkualitas adalah penyusunan kebijakan dan standar yang terkait dengan bidang pengembangan aplikasi, keamanan informasi, pengelolaan infrastruktur, proses bisnis IT, dan tata kelola TIK, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan TIK dan layanan IT di lingkungan Dit. SITP, sehingga dapat sesuai dengan standar umum yang berlaku (ISO) di bidang IT. Penyusunan kebijakan dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya : penyesuaian atas perubahan standar internasional (ISO); perubahan proses bisnis; rekomendasi hasil audit atau assesmen sistem informasi, serta pemenuhan kebutuhan pengguna layanan sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.
Indikator Kinerja Utama:	**3b-N Persentase Pemenuhan Rekomendasi Hasil Audit Tata Kelola TIK berdasarkan Cobit 5.0**
Deskripsi IKU:	**Definisi:** Persentase Pemenuhan Rekomendasi Hasil Audit Tata Kelola TIK berdasarkan Cobit 5.0 mengukur penyelesaian tindak lanjut rekomendasi periode Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang pada tahun 2020, oleh *Unit in Charge* (UIC) terkait di Dit. SITP. Ruang lingkup rekomendasi hasil audit Tata Kelola TIK yang akan ditindaklanjuti, meliputi laporan rekomendasi : *IT Goverment (IT Gov); Control Mechanism (CM); System Development Standard (SDS); Information Processing Facilities (IPF); dan; Performance, Capacity Analysis, Scalability (PCAS)* . **Formula:** (a/b) x 100% **Keterangan :** a = Jumlah Rekomendasi Hasil Audit Tata Kelola TIK Cobit 5.0 dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tata Kelola TIK tahun 2020 yang dinyatakan selesai b = Jumlah Rekomendasi Hasil Audit Tata Kelola TIK Cobit 5.0 dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tata Kelola TIK tahun 2020 **Tujuan:** Untuk menjamin dan memastikan target Rekomendasi Hasil Audit Tata Kelola TIK berdasarkan Cobit 5.0 ditindaklanjuti oleh UIC di Dit. SITP.
Satuan Pengukuran:	Persentase
Jenis Aspek Target :	**(X) Kuantitas** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU :	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU :	( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggungjawab IKU:	Subdit PSII, PSIE, PTTI dan PI
Unit/Pihak Penyedia Data:	Subdit PTTI
Sumber Data:	Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tata Kelola TIK
Jenis Cascading :	( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta **(X) Non Cascading/Complement**
Metode Cascading:	( ) *Direct* **(X) *Indirect***
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum ( ) Average **(X) Raw data**
Polarisasi :	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**
Konversi 120:	( ) Ya **(X) Tidak**

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2018		2019		2020
	target	realisasi	target	realisasi	target
Triwulan I	-	-	-	-	-
Triwulan II	-	-	-	-	-
Triwulan III	-	-	-	-	-
Triwulan IV	-	-	80%	66,42%	80%
Tahunan	-	-	80%	66,42%	80%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

4a-N

Perspektif :	*Internal Process Perspective*
Sasaran Strategis :	**4. Tersedianya Sistem Informasi yang agile, interoperabilitas dan ramah pengguna**
Deskripsi Sasaran Strategis :	Sistem informasi yang *agile,* berarti sistem informasi yang dihasilkan melalui metodologi pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada *Iterative* dan *Incremental Model,* yaitu metode pengembangan sistem yang bersifat jangka pendek, yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Interoperabilitas, berarti kapabilitas sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya, agar dapat berinteraksi dan berfungsi dengan sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi. Ramah pengguna, diraih melalui optimalisasi fungsi *User Experience* (UX) pada saat perancangan *User Interface Design* (UID) sebuah sistem aplikasi, sehingga pengguna mudah menggunakannya serta memberikan tampilan yang menarik.
Indikator Kinerja Utama:	**4a-N Persentase Tingkat Penyempurnaan Aplikasi Perbendaharaan**
Deskripsi:	**Definisi:** Persentase tingkat penyempurnaan aplikasi perbendaharaan mengukur ketepatan waktu proses penyelesaian pengembangan aplikasi perbendaharaan, mulai dari tahap perencangan, analisis pengujian, sampai dengan proses pengajuan hosting aplikasi, yang ditargetkan akan diselesaikan pada tahun 2020. Perhitungan capaian IKU berdasarkan rata-rata capaian per semester, atas 2 (dua) komponen sebagai berikut : 1) Pengembangan Aplikasi (UIC : Subdit PPSI, PSII dan PSIE), realisasi capaian dihitung berdasarkan tahapan final penyelesaian pengembangan aplikasi. 2) Hosting Aplikasi (UIC : Subdit PI), realisasi capaian dihitung berdasarkan pengajuan permintaan hosting ke Pusintek. **Formula:** **1. Komponen Pengembangan Aplikasi** $X = \frac{\sum Jumlah\ aplikasi\ yang\ telah\ selesai\ dikembangkan\ tahun\ 2020}{\sum Jumlah\ target\ aplikasi\ yang\ akan\ dikembangkan\ tahun\ 2020} \times 100\%$ **2. Komponen Hosting Aplikasi** $x = \frac{\sum Jumlah\ aplikasi\ yang\ telah\ selesai\ Hosting\ tahun\ 2020}{\sum Jumlah\ target\ aplikasi\ yang\ akan\ Hosting\ tahun\ 2020} \times 100\%$ **Capaian IKU = Rata-Rata (% Pengembangan Aplikasi + % Hosting Aplikasi)** **Tujuan:** Mengetahui progres penyelesaian pengembangan aplikasi perbendaharaan sampai dengan hosting infrastrukturnya tahun 2020.
Satuan Pengukuran:	Persentase
Jenis Aspek Target :	**(X) Kuantitas** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU :	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU :	( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggungjawab IKU :	Subdit PPSI, Subdit PSII, Subdit PSIE dan Subdit PI
Unit/Pihak Penyedia Data :	Subdit PPSI, Subdit PSII, Subdit PSIE dan Subdit PI
Sumber Data:	Dokumentasi pengembangan aplikasi dan dokumen terkait lainnya.
Jenis Cascading IKU :	( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta **(X) Non Cascading**
Metode Cascading :	( ) Direct **(X) Indirect**

Jenis Konsolidasi Periode:	( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum ( ) Average **(X) Raw data**
Polarisasi:	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan **(X) Triwulanan** ( ) Semesteran ( ) Tahunan
Konversi 120:	( ) Ya **(X) Tidak**

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2018		2019		2020
	target	realisasi	target	realisasi	target
Triwulan I	25%	49,5%	25%	28%	-
Triwulan II	50%	58,62%	50%	52,60%	40%
Triwulan III	75%	77,26%	75%	87,5%	-
Triwulan IV	90%	100%	100%	100%	100%
Tahunan	90%	100%	100%	100%	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

4b-N

Perspektif :	*Internal Process Perspective*
Sasaran Strategis :	**4. Tersedianya Sistem Informasi yang *agile*, interoperabilitas dan ramah pengguna**
Deskripsi Sasaran Strategis :	Sistem informasi yang *agile,* berarti sistem informasi yang dihasilkan melalui metodologi pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada *Iterative* dan *Incremental Model,* yaitu metode pengembangan sistem yang bersifat jangka pendek, yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Interoperabilitas, berarti kapabilitas sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya, agar dapat berinteraksi dan berfungsi dengan sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi. Ramah pengguna, diraih melalui optimalisasi fungsi *User Experience* (UX) pada saat perancangan *User Interface Design* (UID) sebuah sistem aplikasi, sehingga pengguna mudah menggunakannya serta memberikan tampilan yang menarik.
Indikator Kinerja Utama:	**4b-N Persentase implementasi interkoneksi aplikasi perbendaharaan**
Deskripsi:	**Definisi:** Persentase implementasi interkoneksi aplikasi perbendaharaan mengukur ketepatan waktu penyelesaian pengembangan interkoneksi, antara aplikasi perbendaharaan (Aplikasi BUN (SPAN dan OM SPAN); Aplikasi Satuan Kerja (termasuk Aplikasi SAKTI), dan; Aplikasi Supporting lainnya) yang dikembangkan di Dit. SITP, dengan aplikasi eksternal di luar DJPb (Unit Eselon I lain lingkup Kemenkeu, Kementerian/Lembaga lain, Perbankan, dlsb.), maupun antar aplikasi aplikasi perbendaharaan. Perhitungan capaian IKU berdasarkan rata-rata capaian per semester atas 2 (dua) komponen sebagai berikut : 1) Penyiapan aplikasi dan pengembangan interkoneksi (UIC : Subdit PPSI, PSII dan PSIE) 2) Penyiapan data dan *network* interkoneksi (UIC : Subdit PI)
	Formula:
	Komponen Aplikasi
	$x = \frac{\sum Jumlah\ aplikasi\ yang\ telah\ selesai\ disiapkan\ interkoneksinya}{\sum Jumlah\ target\ aplikasi\ yang\ akan\ interkoneksi}$ x 100%
	Komponen Infrastruktur
	$x = \frac{\sum Jumlah\ aplikasi\ interkoneksi\ yang\ telah\ selesai\ disiapkan\ infrastrukturnya}{\sum Jumlah\ target\ aplikasi\ interkoneksi\ yang\ akan\ disiapkan\ infrastrukturnya}$ x 100%
	Capaian IKU = Rata-Rata (% Penyiapan Aplikasi + % Penyiapan Infrastruktur)
	Tujuan: Memonitor progres penyelesaian pengembangan dan implementasi interkoneksi aplikasi perbendaharaan tahun 2020, sesuai dengan fase-fase pengembangannya, termasuk dukungan atas komponen infrastrukturnya.
Satuan Pengukuran:	Persentase
Jenis Aspek Target :	**(X) Kuantitas** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU :	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU :	( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggungjawab IKU :	Subdit PPSI, Subdit PSII, Subdit PSIE dan Subdit PI
Unit/Pihak Penyedia Data :	Subdit PPSI, Subdit PSII, Subdit PSIE dan Subdit PI
Sumber Data:	Dokumentasi pengembangan aplikasi atau dokumen terkait lainnya.
Jenis Cascading IKU :	( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta **(X) Non Cascading/Complement**
Metode Cascading :	( ) Direct **(X) Indirect**

Jenis Konsolidasi Periode:	( ) Sum	( ) Average	**(X) Take Last Known Value**
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum	( ) Average	**(X) Raw data**
Polarisasi:	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran **(X) Tahunan**
Konversi 120:	( ) Ya	**(X) Tidak**	

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2018			2019		2020
	target		realisasi	target	realisasi	target
Triwulan I	-	-	-	-	-	-
Triwulan II	-	-	-	-	-	`
Triwulan III	-	-	-	-	-	-
Triwulan IV	-	-	-	80%	93,4%	80%
Tahunan	-	-	-	80%	93,4%	80%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

4c-N

Perspektif :	*Internal Process Perspective*
Sasaran Strategis :	**4. Tersedianya Sistem Informasi yang agile, interoperabilitas dan ramah pengguna**
Deskripsi Sasaran Strategis :	Sistem informasi yang *agile,* berarti sistem informasi yang dihasilkan melalui metodologi pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada *Iterative* dan *Incremental Model,* yaitu metode pengembangan sistem yang bersifat jangka pendek, yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Interoperabilitas, berarti kapabilitas sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya, agar dapat berinteraksi dan berfungsi dengan sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi. Ramah pengguna, diraih melalui optimalisasi fungsi *User Experience* (UX) pada saat perancangan *User Interface Design* (UID) sebuah sistem aplikasi, sehingga pengguna mudah menggunakannya serta memberikan tampilan yang menarik.
Indikator Kinerja Utama:	**4c-N Persentase tingkat pemenuhan dokumen *Release Management***
Deskripsi:	**Definisi:** Persentase tingkat pemenuhan dokumen *Release Management* mengukur ketepatan waktu penyelesaian **Dokumen Implementasi/ Rilis Sistem Informasi** atas aplikasi/sistem informasi yang akan diimplementasikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perdirjen Perbendaharaan Nomor 26/PB/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. **Formula:** $x = \frac{\sum Jumlah\ aplikasi\ yang\ telah\ selesai\ disusun\ dokumen\ rilis}{\sum Jumlah\ target\ aplikasi\ yang\ akan\ diimplementasikan} \times 100\%$ **Tujuan:** Memonitor progres penyelesaian penyelesaian Dokumen Implementasi/ Rilis Sistem Informasi atas aplikasi/sistem informasi yang akan diimplementasikan.
Satuan Pengukuran:	Persentase
Jenis Aspek Target :	**(X) Kuantitas** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU :	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU :	( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggungjawab IKU :	Subdit PPSI, PSII, dan PSIE
Unit/Pihak Penyedia Data :	Subdit PPSI, PSII, dan PSIE
Sumber Data:	Dokumen Berita Acara Hasil Pengujian dan Analisis Hasil Pengujian.
Jenis Cascading IKU :	( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta **(X) Non Cascading/Complement**
Metode Cascading :	( ) Direct **(X) Indirect**
Jenis Konsolidasi Periode:	( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum ( ) Average **(X) Raw data**
Polarisasi:	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**
Konversi 120:	( ) Ya **(X) Tidak**

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2018			2019		2020
	target		realisasi	target	realisasi	target
Triwulan I	-	-	-	-	-	-
Triwulan II	-	-	-	-	-	`
Triwulan III	-	-	-	-	-	-
Triwulan IV	-	-	-	-	-	100%
Tahunan	-	-	-	-	-	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

5a-CP

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : **5. Tersedianya infrastruktur TIK yang handal**

Deskripsi Sasaran Strategis :

Tersedianya infrastruktur TIK yang handal adalah infrastruktur yang harus mampu menjadi operational backbone untuk semua sistem yang ada dan sistem yang akan digunakan oleh DJPb berikutnya. Handal yang dimaksud termasuk dari sisi ketersediaan, kompatibilitas, dan keamanan, serta harus mampu mendukung misi Cloud Based Information Systems: Mobile Platform, Less Paper, More Educated People.

Indikator Kinerja Utama : **5a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK**

Deskripsi :

Definisi:

A. TINGKAT DOWNTIME SISTEM TIK

Tingkat downtime sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/stakeholder eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas tinggi yang disebabkan oleh gangguan/terhentinya infrastruktur TIK yang meliputi komponen: Kelistrikan, Jaringan DC/DRC, Perangkat Utama (Firewall, DNS, Load balancer, Server management (VM)), Server/OS, Aplikasi, Basis data, dan Jaringan kantor pengguna.

Layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
a. Potensi kerugian finansial;
b. Potensi tuntutan hukum;
c. Citra Kemenkeu;dan
d. Jumlah pengguna yang dirugikan.

Perhitungan downtime layanan tidak termasuk planned downtime, preventive maintenance, dan downtime di luar waktu layanan TIK, serta downtime pada infrastruktur pihak ketiga penyedia layanan jaringan. Layanan TIK yang didukung dengan teknologi High Availability, perhitungan downtime menggunakan data yang paling rendah.
Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK.
Downtime layanan TIK dihitung berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan menggunakan alat monitoring yang disepakati dan hasil penyelarasan dengan pelaporan SLA.

Komponen downtime:
1. Setjen (Seluruh sistem TIK hosting): Kelistrikan, Jaringan DC/DRC, Perangkat Utama (Firewall, DNS, Load balancer, Server management (VM)), Server/OS, Aplikasi, Basis data, dan Jaringan kantor pengguna.
2. DJP dan LNSW: Kelistrikan, Jaringan DC/DRC, Perangkat Utama (Firewall, DNS, Load balancer, Server. management (VM)), Server/OS, Aplikasi, dan Basis data.
3. DJBC: Jaringan DC/DRC, Perangkat Utama (Firewall, DNS, Load balancer, Server management (VM)), Server/OS, Aplikasi, dan Basis data.
4. Unit Eselon I Lainnya (Sistem TIK Unit Eselon I co-location): Server/OS, Aplikasi, dan Basis data.

Layanan Downtime Sistem TIK Ditjen Perbendaharaan tahun 2020, meliputi :

Aplikasi Kritikal	Komponen Downtime	Waktu Layanan per hari	Subdit UIC
1. SPAN	Server/OS, Aplikasi, dan Basis data	10 Jam (Hari Kerja: 06.00 WIB - 17.00 WIB)	Subdit PSII dan PI
2. MPN G2	Server/OS, Aplikasi, dan Basis data	24 Jam (Hari Kerja)	Subdit PPSI dan PI
3. OM SPAN (Core)	Server/OS, Aplikasi, dan Basis data	24 Jam (Hari Kerja)	Subdit PSII dan PI
4. e-REKON & LK	Server/OS, Aplikasi, dan Basis data	8 Jam (Hari Kerja: 08.00 WIB - 17.00 WIB)	Subdit PPSI dan PI
5. SAKTI	Server/OS, Aplikasi, dan Basis data	10 Jam (Hari Kerja: 06.00 WIB - 17.00 WIB)	Subdit PSIE dan PI
6. Custom Web	Server/OS	10 Jam (Hari Kerja: 06.00 WIB - 17.00 WIB)	Subdit PI

B. PERSENTASE PENYELESAIAN PROYEK STRATEGIS TIK

Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK adalah kegiatan penyelesaian proyek TIK strategis (baik yang ada dalam IS RBTK maupun non IS RBTK) tahun 2020 yang telah diselesaikan sesuai norma waktu

Proyek TIK strategis adalah Proyek TIK pada Unit Eselon I/Non Eselon I yang terkait dengan rencana strategis dan arsitektur TIK Kementerian Keuangan, mendukung kelangsungan proses bisnis utama organisasi (Kemenkeu dan/atau Unit Eselon I/Non Eselon I lain), dan/atau dianggap strategis oleh Unit Eselon I/Non Eselon I yang bersangkutan.

Formula:

A. TINGKAT DOWNTIME SISTEM TIK

Target IKU	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahun 2020
	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Downtime Per Jenis Layanan Kritikal $= \frac{\sum(\frac{Downtime\ per\ Komponen\ Layanan\ Kritikal}{Total\ Waktu\ Layanan\ Kritikal})\ 100\%}{Jumlah\ Komponen\ Layanan\ Kritikal}$

Downtime Setjen/DJP $= \sum(\frac{Downtime\ per\ Jenis\ Layanan\ Kritikal}{Jumlah\ Jenis\ Layanan\ Kritikal})\ 90\% + Downtime\ jaringan\ kantor\ pengguna\ (10\%)$

Downtime Unit Es. I Non Setjen/DJP $= \sum \frac{Downtime\ \text{per Jenis}\ Layanan\ Kritikal}{Jumlah\ Jenis\ Layanan\ Kritikal}$

Capaian Tingkat Downtime Sistem TIK **= *[1 + (1 - Realisasi Tingkat Downtime Sistem TIK / 0,1%] x 100***

B. PERSENTASE PENYELESAIAN PROYEK STRATEGIS TIK

Target IKU	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahun 2020
	-	-	-	85%	85%

Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK = Rata-Rata penyelesaian *milestones*

Capaian Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK **= *(Realisasi Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK / 85%) X 100***

Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK = **(Capaian Tingkat Downtime Sistem TIK + Capaian Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK) / 2**

Tujuan:

Untuk mengukur kualitas pengelolaan sistem TIK melalui ketersediaan sistem layanan TIK dalam rangka meningkatkan ketersediaan layanan TIK dengan tingkat *downtime* yang seminimal mungkin, dan penyelesaian proyek strategis TIK yang terdapat dalam IS RBTK maupun yang tidak terdapat dalam IS RBTK

Satuan Pengukuran : Indeks

Jenis Aspek Target pada SKP : **(X) Kuantitas** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU : ( ) High **(X) Moderate** ( ) Low

Tingkat Validitas IKU : ( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Subdit PSII, PSIE, PPSI dan PI

Unit/Pihak Penyedia Data : Subdit PSII, PSIE, PPSI dan PI

Sumber Data : Laporan Downtime Sistem TIK DJPb dan Laporan Monitoring Proyek Strategis TIK

Jenis Cascading IKU: **(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non peta ( ) Non-Cascading

Metode Cascading : **(X) Direct** ( ) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**

Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( ) Average **(X) Raw data**

Polarisasi Indikator Kinerja : **(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**

Konversi 120 : ( ) Ya **(X) Tidak**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	100

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

5b-N

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : **5. Tersedianya infrastruktur TIK yang handal**

Deskripsi Sasaran Strategis :

Tersedianya infrastruktur TIK yang handal adalah infrastruktur yang harus mampu menjadi *operational backbone* untuk semua sistem yang ada dan sistem yang akan digunakan oleh DJPb berikutnya. Handal yang dimaksud termasuk dari sisi ketersediaan, kompatibilitas, dan keamanan, serta harus mampu mendukung misi *Cloud Based Information Systems: Mobile Platform, Less Paper, More Educated People* .

Indikator Kinerja Utama : **5b-N Indeks keberhasilan switchover sistem TIK pada DC/DRC**

Deskripsi :

Definisi:

Switchover sistem TIK pada DC dan DRC merupakan kegiatan pengalihan operasional sistem TIK dari DC ke DRC hingga kembali lagi ke DC yang mengacu pada ketersediaan dan kesesuaian dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) serta keberlangsungan sistem TIK selama beroperasi di DRC. Dengan keberhasilan switchover sistem TIK, diharapkan dapat meminimalisir kegagalan sistem pada saat terjadi keadaan kahar dalam rangka menjamin kelangsungan proses bisnis Kemenkeu. Dengan demikian layanan TIK dapat terjaga ketersediaannya atau segera dioperasikan sesuai dengan norma waktu yang disepakati dengan mengacu pada rencana/skenario pengujian yang menjadi bagian dari dokumen DRP.

Kelangsungan layanan TIK diuji melalui switchover sistem TIK dengan memanfaatkan DRC Kemenkeu yang selanjutnya diharapkan DRC Kemenkeu dapat berfungsi sebagai DC kedua dan secara bertahap berfungsi sebagai resiprokal DC Kemenkeu dalam mendukung proses bisnis. Disaster Recovery Plan yang selanjutnya disingkat DRP adalah dokumen yang berisikan rencana tindak yang diperlukan guna pemulihan layanan TIK setelah terdampak dari bencana.

Keadaan Kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Sistem TIK yang diuji untuk switchover adalah sistem TIK yang sangat kritikal dan kritikal dan menjadi layanan publik. Untuk Pusintek, ruang lingkup mencakup seluruh sistem TIK yang merupakan aplikasi hosting, dan untuk Unit Eselon I dengan ruang lingkup mencakup aplikasi co-location (aplikasi dan database).

Ruang lingkup keberhasilan switchover:
1. Kelengkapan DRP (Indeks 30)
2. Kecepatan switchover dari DC ke DRC berdasarkan DRP (Indeks 40)
3. Lama sistem TIK beroperasi di DRC (Indeks 30)

Formula:

A. Kelengkapan DRP (Bobot 30%)	**Indeks**	**UIC**
1. DRP sebelum *switchover*	10	Subdit PTTI
2. DRP sesudah *switchover* (mutakhir)	20	

B. Kecepatan *switchover* (formulasi ketepatan waktu: Bobot 40%)		**UIC**
1. *Switchover* dari DC ke DRC (50%)		Subdit PI, Subdit PSII,
2. *Switchover* dari DRC kembali ke DC (50%)		Subdit PSIE, Subdit PPSI
	Indeks	
a. Lebih cepat dari target	100	
b. Tepat Waktu	90	
c. Lebih lambat dari target	80	

C. Running time sistem TIK di DRC (Bobot 30%)	**Indeks**	**UIC**
1. Transaksi Keuangan Negara		Subdit PI, Subdit PSII,
a. Tanpa Data Real (tidak ada range waktu)	70	Subdit PSIE, Subdit PPSI
b. Dengan Data Real range: x<1 minggu	90	
c. Dengan Data Real range: 1 minggu s.d. 2 bulan	100	
d. Dengan Data Real range: x > 2 bulan	80	
2. Non Transaksi Keuangan Negara		
a. Tanpa Data Real (tidak ada range waktu)	65	
b. Dengan Data Real range: x<1 minggu	70	
c. Dengan Data Real range: 1 s.d. <2 minggu	75	
d. Dengan Data Real range: 2 s.d. <3 minggu	85	
e. Dengan Data Real range: 3 minggu s.d. 2 bulan	100	
f. Dengan Data Real range: > 2 bulan	80	

Indeks keberhasilan *switchover* sistem TIK pada DC/DRC **= Rata-rata indeks capaian keberhasilan switchover per layanan**

Tujuan:

Mengukur kecepatan pemindahan sistem TIK dari DC ke DRC dalam rangka menjaga keberlangsungan sistem TIK pada saat terjadi bencana, sehingga proses bisnis Kementerian Keuangan yang didukung oleh sistem TIK tetap dapat berjalan dengan baik serta mendorong dan meningkatkan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Satuan Pengukuran : Indeks

Jenis Aspek Target pada SKP : ( ) Kuantitas/Output **(X) Kualitas/Mutu** ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU : ( ) High **(X) Moderate** ( ) Low

Tingkat Validitas IKU : ( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Subdit PI, PSII, PSIE,PPSI dan PTTI

Unit/Pihak Penyedia Data : Subdit PI, PSII, PSIE,PPSI dan PTTI

Sumber Data : Dokumen DRP, Laporan Pelaksanaan *Switchover DC/DRC*

Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta **(X) Non-Cascading**

Metode Cascading : **(X) Direct** ( ) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**

Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( ) Average **(X) Raw data**

Polarisasi Indikator Kinerja : **(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan **(X) Semesteran** ( ) Tahunan

Konversi 120 : ( ) Ya **(X) Tidak**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	N/A	N/A	-	-	-
Triwulan II	N/A	N/A	10	10	10
Triwulan III	N/A	N/A	-	-	-
Triwulan IV	N/A	N/A	80	93,8	85
Tahunan	N/A	N/A	80	93,8	85

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

6a-N

Perspektif :	*Internal Process Perspective*
Sasaran Strategis :	**6. Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang kredibel**
Deskripsi Sasaran Strategis :	Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang kredibel harus memastikan perlindungan terhadap aspek-aspek : 1) *Confidentiality* (kerahasiaan), yaitu menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan disimpan; 2) *Integrity* (integritas), yaitu menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang (*authorized*), menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integrity ini; serta, 3) *Availability* (ketersediaan), yaitu menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait.
Indikator Kinerja Utama :	**6a-N Indeks Sistem Manajemen Keamanan Informasi**
Deskripsi :	**Definisi:** Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah sistem manajemen yang meliputi kebijakan, organisasi, perencanaan, penanggung jawab, proses, dan sumber daya yang mengacu pada pendekatan risiko bisnis untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, mengevaluasi, mengelola, dan meningkatkan keamanan informasi. Penerapan SMKI di lingkungan Kementerian Keuangan berpedoman pada KMK nomor 942/KMK.01/2019 tentang Pengelolaan Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan Indeks SMKI merupakan suatu metode untuk mengevaluasi tingkat penerapan Keamanan Informasi di lingkungan Kementerian Keuangan dengan berpedoman pada KMK nomor 942/KMK.01/2019. Kegiatan yang diperlukan dalam rangka mendukung proses penilaian Indeks SMKI adalah: 1. Penentuan klasifikasi/kategorisasi sistem elektronik 2. Penilaian mandiri atas seluruh klausul menggunakan kertas kerja Indeks SMKI 3. Penyampaian hasil penilaian mandiri ke CIO dan Itjen c.q. Ir. 7 dan Pusintek (Tahapan 1, 2) 4. Validasi oleh Itjen dan didukung oleh Pusintek **Formula:** **Indeks Sistem Manajemen Keamanan Informasi = Nilai Indeks SMKI** **Tujuan:** Mendorong dan meningkatkan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Satuan Pengukuran :	Indeks
Jenis Aspek Target :	**(X) Kuantitas** ( ) Kualitas/Mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU :	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU :	( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Subdit Pengelolaan Infrastruktur
Unit/Pihak Penyedia Data :	Subdit Pengelolaan Infrastruktur
Sumber Data :	Laporan hasil penilaian SMKI
Jenis Cascading IKU:	( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta **(X) Non-Cascading**
Metode Cascading :	**(X) Direct** ( ) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum ( ) Average **(X) Raw data**
Polarisasi :	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**
Konversi 120 :	( ) Ya **(X) Tidak**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	-
Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	-
Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	-
Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	**3 (Skala 5)**
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	**3 (Skala 5)**

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

7a-N

Perspektif :	*Internal Process Perspective*
Sasaran Strategis :	**7. Layanan Pengguna dan media komunikasi yang responsif dan modern**
Deskripsi Sasaran Strategis :	Responsif berarti layanan pengguna dan media komunikasi dengan pengguna diarahkan untuk menghasilkan dukungan layanan dengan kualitas serta tingkat respon yang tinggi. Sisi manusia sebagai pintu pertama pelayanan permintaan pengguna didukung oleh sistem layanan pengguna yang modern, mampu mengoptimalkan teknologi yang tersedia dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pengguna. Inovasi pemberian layanan tidak hanya bermuara pada bagaimana pengguna didorong untuk dapat mengoptimalkan fitur yang tersedia guna menyelesaikan permasalahannya secara rnandiri (*shift left strategy*), akan tetapi sampai kepada analisis permasalahan yang berujung pada suatu sistem yang dapat memperkirakan potensi permasalahan (*incident-problem interception*).
Indikator Kinerja Utama:	**7a-N Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb**
Deskripsi:	**Definisi:** 1) Dasar hukum operasionalisasi HAI-DJPB yaitu KEP-428/PB/2016 tentang Layanan Pengguna Terintegrasi HAI DJPB yaitu menyediakan layanan pengguna yang terintegrasi sebagai upaya untuk menjamin penyediaan layanan yang tepat waktu dan profesional atas permasalahan yang dihadapi oleh pengguna dibidang perbendaharaan 2) Efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna layanan atas implementasi layanan Contact Center HAI DJPb pada setiap departemen layanan yang dimiliki oleh unit eselon 2 pada lingkup kantor pusat Ditjen Perbendaharaan. 3) Indeks Efektivitas diukur berdasarkan parameter indek kualitas layanan dan ketepatan waktu layanan yang dilakukan oleh masing masing departemen layanan yang dimiliki oleh unit eselon 2 lingkup kantor pusat Ditjen Perbendaharaan. 4) Kualitas layanan adalah tingkat kepuasan dari Pengguna terhadap layanan konsultasi HAI-DJPb yang dapat diukur dan selanjutnya dapat dijadikan bahan kajian untuk dilakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap layanan yang diberikan. 5) Indeks kualitas layanan diukur berdasarkan Survey kepuasan pengguna layanan HAI DJPb terhadap setiap departemen layanan yang dimiliki oleh unit eselon 2 lingkup kantor pusat Ditjen Perbendaharaan. Untuk pelaksanaan survey akan dilakukan secara semesteran dan memiliki bobot 40% 6) Acuan pengukuran ketepatan waktu berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-272/PB/2017 tentang Katalog Layanan Helpdesk Terintegrasi HAI DJPB dan Service Level Agreement (SLA) yaitu sebagai berikut: Layanan Kategori P1 : SLA: 1 hari kerja (8 jam kerja layanan) Layanan Kategori P2 : SLA: 2 hari kerja (16 jam kerja layanan) Layanan Kategori P3 : SLA: 3 hari kerja (24 jam kerja layanan) Layanan Kategori P4 : SLA: 4 hari kerja (32 jam kerja layanan) Layanan Kategori P5 : SLA: 5 hari kerja (40 jam kerja layanan) Jam kerja layanan adalah hari kerja antara pkl. 08.00 sd 16.00 waktu setempat 7) Indeks ketepatan waktu penyelesaian tiket diukur dengan berdasarkan persentase tiket yang diselesaikan tepat SLA dibandingkan dengan seluruh tiket yang masuk dan memiliki bobot perhitungan sebesar 60%. Dengan range indeks sebagai berikut : Indeks 1 : ≤ 75% diselesaikan secara tepat waktu Indeks 2 : 75% ≤ x ≤ 85% diselesaikan secara tepat waktu Indeks 3 : 85% ≤ x ≤ 95% diselesaikan secara tepat waktu Indeks 4 : 95% ≤ x ≤ 100% diselesaikan secara tepat waktu 8) Untuk IKU Kemenkeu-Two merupakan perhitungan berdasarkan indeks kualitas dan indeks ketepatan waktu layanan yang diberikan kepada pengguna untuk seluruh departemen layanan HAI yang berada dibawah direktoratnya. **Formula:** **Capaian Indeks Efektivitas Implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb = (∑((Indeks Kualitas Layanan x Bobot)) + (Indeks Ketepatan waktu x Bobot))** **Tujuan Strategis:** Menyempurnakan dan mengembangkan produk dan layanan Perbendaharaan berdasarkan masukan/ usulan dari stakeholder, serta mendorong Direktorat agar dapat menyampaikan jawaban secara tepat waktu tidak melewati batas ketentuan SLA serta untuk memastikan jawaban dapat memberikan kepuasan Pengguna secara maksimal. Selain itu diharapkan dengan tercapainya efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb maka dapat dicapai peningkatan kepercayaan dan kepuasan dari stakeholder.
Satuan Pengukuran:	Indeks
Jenis Aspek Target :	( ) Kuantitas **(X) Kualitas** ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU :	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low

Tingkat Validitas IKU :	**(X) Exact**	( ) Proxy	( ) Activity
Unit/Pihak Penanggungjawab IKU:	Direktur SITP		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Subdit PSIE - Seksi Layanan Pengguna		
Sumber Data:	Hasil rekapitulasi pada Dashboard Monitoring IKU HAI DJPB		
Jenis Cascading IKU:	( ) Cascading Peta	( ) Cascading Non peta	**(X) Non-Cascading**
Metode Cascading :	( ) Direct	**(X) Indirect**	( ) Non Cascading/Complement
Jenis Konsolidasi Periode:	( ) Sum	**(X) Average**	( ) Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi:	( ) Sum	( ) Average	**(X) Raw Data**
Polarisasi :	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	**(X) Semesteran** ( ) Tahunan
Konversi 120 :	( ) Ya	**(X) Tidak**	

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020
	target	realisasi	target	realisasi	target
Triwulan I	-	-	-	-	-
Triwulan II	3,5	4,79	3,2	3,86	3,2
Triwulan III	-	-	-	-	-
Triwulan IV	3,5	4,79	3,2	3,87	3,2
Tahunan	3,5 (skala 5)	4,79	3,2 (skala 4)	3,87	3,2 (skala 4)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

8a-N

Perspektif :	*Internal Process Perspective*
Sasaran Strategis :	**8. Peningkatan Kapasitas *Stakeholders* yang Efektif**
Deskripsi Sasaran Strategis :	Tingkat pemahaman stakeholders terhadap arah pengembangan sistem informasi teknologi perbendaharaan adalah upaya untuk memberikan pemahaman kepada stakeholders mengenai pengembangan sistem informasi teknologi perbendaharaan yang mencakup penyempurnaan proses bisnis, koneksitas proses bisnis antar stakeholders, serta pengembangan sistem aplikasi perbendaharaan yang baru.
Indikator Kinerja Utama :	**8a-N Persentase tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi**

Deskripsi:

Definisi:

IKU ini mengukur keterpenuhan pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi yang dilakukan oleh seluruh PIC aplikasi, infrastruktur, tata kelola TIK dan topik terkait lainnya di lingkup Dit. SITP terhadap *stakeholders* yang terkait.

Indikator efektivitas kegiatan edukasi dan komunikasi dinilai dinilai berdasarkan tersedianya komponen-komponen yang harus disiapkan oleh PIC kegiatan, sebelum kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya :

1) Sosialisasi jadwal pelaksanaan kegiatan kepada stakeholders (Surat Undangan, Nota DInas, dlsb.)
2) Materi/kurikulum training/pelatihan teknis/bimtek/sosialisasi (berupa slide, video, pdf, dlsb.)
2) T*rainer* yang ditunjuk (*dedicated trainer*)
3) Materi *Pra-Test* dan/atau *Post-Test* untuk mengukur tingkat pemahaman peserta

Apabila komponen-komponen tersebut telah tersedia, maka kegiatan edukasi dan komunikasi dapat diselenggarakan, dan diukur berdasarkan formula dibawah ini :

Formula :

$$x = \frac{\sum Jumlah\ kegiatan\ edukasi\ dan\ komunikasi\ yang\ direalisasikan\ di\ tahun\ 2020}{\sum Jumlah\ target\ kegiatan\ edukasi\ dan\ komunikasi\ tahun\ 2020} \text{ x } 100\%$$

Tujuan Strategis :

Untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi yang dilaksanakan di tahun 2020.

Satuan Pengukuran:	Persentase			
Jenis Aspek Target :	**(X) Kuantitas**	( ) Kualitas	( ) Waktu	( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU :	( ) High	**(X) Moderate**	( ) Low	
Tingkat Validitas IKU :	( ) Exact	**(X) Proxy**	( ) Activity	
Unit /Pihak Penanggung Jawab IKU:	Seluruh Subdit di lingkup Dit. SITP			
Unit penyedia data:	Seluruh Subdit di lingkup Dit. SITP			
Sumber Data:	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Komunikasi lingkup Dit. SITP			
Jenis Cascading IKU :	( ) Cascading Peta	( ) Cascading Non peta	**(X) Non-Cascading**	
Metode Cascading :	( ) Direct	**(X) Indirect**		
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum	( ) Average	**(X) Take Last Known Value**	
Jenis Konsolidasi Lokasi:	( ) Sum	( ) Average	**(X) Raw Data**	
Polarisasi Indikator Kinerja:	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	**(X) Tahunan**
Konversi 120 :	( ) Ya	**(X) Tidak**		

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2018		2019		2020
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Semester I	-	-	-	-	-
Semester II	-	-	-	-	100%
Tahunan	-	-	-	-	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI PERBRNDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

9a-N

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : **9. Pengelolaan Sistem Informasi yang akuntabel dan transparan**

Deskripsi Sasaran Strategis : Pengelolaan sistem informasi yang akuntabel dan transparan ikut berperan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat yang kredibel dan terpercaya. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, ketepatan waktu penyelesaian UU PP APBN, serta opini audit yang baik dari BPK.

Indikator Kinerja Utama : **9a-N Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti**

Deskripsi Indikator Kinerja Utama :

Definisi:

Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LKPP dan LK BUN perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Setiap K/L dan Pengguna Anggaran BUN diwajibkan menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait. TP BPK tersebut setiap akhir bulan Maret, Juli, November, dan Desember.

Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana *action plan* dengan *timeframe* yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

a. rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai, ditetapkan pada forum pembahasan bersama DJPb, Itjen, unit eselon I terkait dan Auditor BPK.

b. rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam LHP.

Formula:

$$\text{Semester I} = \left(\frac{\text{Rekomendasi LKPP dinyatakan selesai oleh BPK}}{\textit{Outstanding}\ \text{rekomendasi LKPP s. d. 2018}} \times 50\%\right) + \left(\frac{\text{Rekomendasi LKBUN yang dinyatakan selesai oleh BPK}}{\textit{Outstanding}\ \text{rekomendasi LKBUN s. d. 2018}} \times 50\%\right)$$

$$\text{Semester II} = \left(\frac{\text{Rekomendasi LKPP dinyatakan selesai oleh BPK + yang diusulkan selesai}}{\textit{Outstanding}\ \text{rekomendasi LKPP s. d. 2019}} \times 50\%\right) + \left(\frac{\text{Rekomendasi LKBUN yang dinyatakan selesai oleh BPK + yang diusulkan selesai}}{\textit{Outstanding}\ \text{rekomendasi LKBUN s. d. 2019}} \times 50\%\right)$$

Tujuan:

Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara

Satuan Pengukuran : Persentase

Jenis Aspek Target : **(X) Kuantitas** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU : ( ) High **(X) Moderate** ( ) Low

Tingkat Validitas IKU : ( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Subdit PPSI, PSII dan PSIE

Unit/Pihak Penyedia Data : Dit. APK

Sumber Data : Rekapitulasi monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN

Jenis Cascading IKU : ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta (X) Non-Cascading

Metode Cascading : ( ) Direct **(X) Indirect**

Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**

Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( ) Average **(X) Raw data**

Polarisasi Indikator Kinerja : **(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan **(X) Semesteran** ( ) Tahunan

Konversi 120 : ( ) Ya **(X) Tidak**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Semester I	30%	59,85%	30%	70.00%	30%
Semester II	89%	100.00%	89%	100.00%	89%
Tahunan	89%	100.00%	89%	100.00%	89%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

10a-N

Perspektif :	*Learning and Growth Perspective*
Sasaran Strategis :	**10. SDM yang kompeten**
Deskripsi Sasaran Strategis :	SDM yang kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.
Indikator Kinerja Utama:	**10a-N Nilai Rata-rata *Hard Competency* Pegawai**

Deskripsi:

Definisi:

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai Direktorat SITP terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga *output* nya dapat dijadikan sebagai pemetaan *hard competency* pegawai.

Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan, yaitu 70% tusi eselon IV yang bersangkutan + 30% tusi/pengetahuan lainnya.

Untuk Kemenkeu-*Two* Direktorat, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai Direktorat.

Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing.

Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes *hard competency* namun berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available).
Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol).
Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan.

Formula:

$$\frac{\textbf{Jumlah Nilai Hard compertency pegawai Direktorat SITP}}{\textbf{Jumlah pegawai Direktorat SITP yang mengikuti tes } \textbf{\textit{hard competency}}}$$

Tujuan:

IKU ini bertujuan mendorong pimpinan unit agar secara berkelanjutan selalu melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi para pegawai.

Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Aspek Target :	**(X) Kuantitas**	( ) Kualitas	( ) Waktu	( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU :	( ) High	**(X) Moderate**	( ) Low	
Tingkat Validitas IKU :	( ) Exact	**(X) Proxy**	( ) Activity	
Unit /Pihak Penanggung Jawab IKU:	Seluruh pegawai lingkup Direktorat SITP			
Unit penyedia data:	Setditjen Perbendaharaan			
Sumber Data:	Laporan hasil pelaksanaan ujian pada aplikasi training perbendaharaan			
Jenis Cascading IKU :	( ) Cascading Peta	( ) Cascading Non peta	**(X) Non-Cascading**	
Metode Cascading IKU :	( ) Direct	**(X) Indirect**		
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum	( ) Average	**(X) Take Last Known Value**	
Jenis Konsolidasi Lokasi:	( ) Sum	( ) Average	**(X) Raw Data**	
Polarisasi Indikator Kinerja:	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	**(X) Tahunan**
Konversi 120 :	( ) Ya	**(X) Tidak**		

Periode Pelaporan	2018		2019		2020
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	75	93,5	77	94,74	77

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

11a-N

Perspektif	*Learning and Growth Perspective*
Sasaran Strategis	**11. Organisasi yang *Fit for Purpose***
Deskripsi Sasaran Strategis	Organisasi *Fit for Purpose* yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.
Indikator Kinerja Utama	**11a-N Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis *Strategy* Focused Organization *(SFO)***
Deskripsi:	**Definisi:** Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategy Focused Organization* (SFO). Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing. Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut: a. Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2020(60%). b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2019 (40%). **Formula:** **Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Setditjen Perbendaharaan** **Tujuan:** IKU ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja di setiap unit lingkup Ditjen Perbendaharaan.
Satuan Pengukuran:	Nilai
Jenis Aspek Target :	**(X) Kuantitas** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU :	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU :	( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity
Unit /Pihak Penanggung Jawab IKU:	Subdit Pengelolaan Transformasi Teknologi Informasi
Unit penyedia data:	Setditjen Perbendaharaan
Sumber Data:	Kepdirjen Perbendaharaan/surat Hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja
Jenis Cascading IKU :	( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta **(X) Non-Cascading**
Metode Cascading IKU :	( ) Direct **(X) Indirect**
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**
Jenis Konsolidasi Lokasi:	( ) Sum ( ) Average **(X) Raw Data**
Polarisasi Indikator Kinerja:	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**
Konversi 120 :	( ) Ya **(X) Tidak**

Periode Pelaporan	2018		2019		2020
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	83	89,64	83	90,19	83

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

11b-N

Perspektif :	*Learning and Growth Perspective*
Sasaran Strategis :	**11. Organisasi yang Fit for Purpose**
Deskripsi Sasaran Strategis :	Organisasi *Fit for Purpose* yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.
Indikator Kinerja Utama:	**11b-N Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal**
Deskripsi:	**Definisi:** Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Penilaian tersebut dilakukan oleh Setditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Kepatuhan Internal . Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen No. KEP-415/PB/2017 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanakan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas: 1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%) 2. Pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern (bobot: 35%) 3. Kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%) 4. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%) **Formula:** **Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Setditjen Perbendaharaan** **Tujuan:** Untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Direktorat SITP
Satuan Pengukuran:	Nilai
Jenis Aspek Target :	**(X) Kuantitas** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU :	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU :	( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity
Unit /Pihak Penanggung Jawab IKU:	Subdit PTTI
Unit penyedia data:	Bagian Kepatuhan Internal, Setditjen Perbendaharaan
Sumber Data:	Kepdirjen Perbendaharaan/surat Hasil penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal
Jenis Cascading IKU :	( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta **(X) Non-Cascading**
Metode Cascading IKU :	( ) Direct **(X) Indirect**
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**
Jenis Konsolidasi Lokasi:	( ) Sum ( ) Average **(X) Raw Data**
Polarisasi Indikator Kinerja:	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**
Konversi 120 :	( ) Ya **(X) Tidak**

Periode Pelaporan	2018		2019		2020
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	78	91,18	83	93,82	83

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

12a-N

Perspektif : *Learning and Growth Perspective*

Sasaran Strategis : **12. Pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal**

Deskripsi Sasaran Strategis :

Pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal adalah modernisasi teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung utama proses bisnis, harus mampu mendukung terciptanya peningkatan kinerja dan kemajuan bagi organisasi melalui pemanfaatannya secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Adopsi dan pemanfaatan teknologi informasi akan cepat diterima di lingkup organisasi apabila memiliki karateristik : tingkat penggunaan yang mudah, memberi manfaat, dan memberi nilai tambah bagi organisasi.

Indikator Kinerja Utama : **12a-N Persentase penyediaan fasilitas IoT untuk mendukung implementasi *smart office***

Deskripsi:

Definisi:

Internet of Things (IoT) adalah suatu konsep dimana objek tertentu memiliki kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, dimana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa adanya campur tangan manusia dan tanpa terbatas oleh jarak berapapun jauhnya, dengan menggunakan internet sebagai penghubung antara kedua interaksi mesin tersebut. Salah satu contoh penggunaan perangkat IoT, misalnya : alat yang dipakai untuk memantau dan mengontrol penggunaan energi di lingkungan kantor secara *real-time* untuk mengurangi konsumsi energi.

IKU ini mengukur pemenuhan ketersediaan fasilitas IoT di kantor Dit. SITP untuk mendukung implementasi konsep *smart office dan green office.*

Formula :

$$x = \frac{\sum Jumlah\ fasilitas\ IoT\ yang\ telah\ diimplementasikan\ tahun\ 2020}{\sum Jumlah\ target\ fasilitas\ IoT\ yang\ direncanakan\ tahun\ 2020} \text{ x } 100\%$$

Tujuan Strategis :

Untuk memonitor penyediaan fasilitas IoT di Dit. SITP tahun 2020.

Satuan Pengukuran: Persentase

Jenis Aspek Target : **(X) Kuantitas** ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU : ( ) High **(X) Moderate** ( ) Low

Tingkat Validitas IKU : ( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity

Unit /Pihak Penanggung Jawab IKU: Subdit PTTI

Unit penyedia data: Subdit PTTI

Sumber Data: Laporan Monitoring Penyediaan Fasilitas IoT di Dit. SITP

Jenis Cascading IKU : ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta **(X) Non-Cascading**

Metode Cascading : **(X) Direct** ( ) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**

Jenis Konsolidasi Lokasi: ( ) Sum ( ) Average **(X) Raw Data**

Polarisasi Indikator Kinerja: **(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**

Konversi 120 : ( ) Ya **(X) Tidak**

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2018		2019		2020
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	80%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

13a-CP

Perspektif :	*Learning and Growth Perspective*
Sasaran Strategis :	**13. Pengelolaan anggaran yang berkualitas**
Deskripsi Sasaran Strategis :	Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.
Indikator Kinerja Utama :	**13a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran**
Deskripsi :	**Definisi:**

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. **Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM**. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi **70% komponen hasil dan 30% komponen proses**.

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:
1) Capaian Keluaran, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian Indikator Kinerja Output (*Value for Money*).
2) Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi (NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan *reward* atas usaha efisiensi.
3) Konsistensi (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan), adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus).
4) Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk *self-blocking* , hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), dan dana khusus (sesuai SE-35/2017).
5) Penyelesaian Tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai.
6) Data Kontrak, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN.
7) Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh *record* GUP.

8) Perencanaan Kas (Renkas), sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.
9) Penyampaian LPJ, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio LPJ tepat waktu terhadap seluruh LPJ yang disampaikan ke KPPN.
10) Pengembalian SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.
11) Retur SP2D, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D dengan jumlah SP2D yang terbit.
12) Revisi DIPA, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker (hanya revisi pagu tetap).
13) Pagu Minus, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya.
14) Dispensasi SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.

Formula:

Realisasi IKU =
[(% capaian keluaran x 30%) + (% efisiensi x 15%) + (% konsistensi x 10%) + (% penyerapan anggaran atas pagu netto x 15%)] + [(% penyelesaian tagihan x 4%) + (% penyampaian data kontrak x 3%) + (% pengelolaan UP x 4%) + (% perencanaan kas x 2%) + (%penyampaian LPJ x 2%) + (% pengembalian SPM x 3%) + (% retur SP2D x 3%) + (% revisi DIPA x 5%) + (% pagu minus x 2%) + (% dispensasi SPM x 2%)]

No.	Komponen Pengukuran			Bobot
Komponen Hasil				
1.	Capaian Keluaran	x	30%	70%
2.	Efisiensi	x	15%	
3.	Konsistensi	x	10%	
4.	Penyerapan anggaran atas pagu netto	x	15%	
Komponen Proses				
5.	Penyelesaian tagihan	x	4%	30%
6.	Penyemapaian data kontrak	x	3%	
7.	Pengelolaan UP	x	4%	
8.	Perencanaan Kas	x	2%	
9.	Penyampaian LPJ	x	2%	
10.	Pengembalian SPM	x	3%	
11.	Retur SP2D	x	3%	
12.	Revisi DIPA	x	5%	
13.	Pagu Minus	x	2%	
14.	Dispensasi SPM	x	2%	

1. Capaian Keluaran

$$CKP = \prod_{i=1}^{m}\left(\left(\left(\prod_{m}^{n}\frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i}\right)^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{m}}\right)\times 100\%$$

$$CKK = \prod_{i=1}^{m}\left(\left(\frac{\text{RVK ke i}}{\text{TVK ke i}}\times\left(\prod_{j=1}^{n}\frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i}\right)^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{m}}\right)$$

2. Efisiensi

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 90\% + \left(\frac{E}{20} \times 20\right)$$

3. Konsistensi

$$\%\ konsistensi = \frac{\sum_{i=1}^{n}\%\ konsistensi\ per\ bulan}{n}$$

$$\%\ konsistensi\ per\ bulan = \left(1 - \left(\frac{|RPD - Realisasi\ Penyerapan|}{RPD}\right) \times 100\%\right)$$

4. Penyerapan Anggaran atas Pagu Netto

$$\text{Penyerapan} = \frac{\text{realisasi penyerapan anggaran atas pagu neto}}{\text{pagu neto}} \times 100\%$$

Pagu neto = Total pagu bruto – (pagu belanja pegawai + *self blocking* + hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan + pagu dana khusus)

Realisasi penyerapan anggaran atas pagu neto = Total realisasi bruto – (realisasi belanja pegawai + realisasi dana khusus)

Untuk 10 indikator yang termasuk Komponen Proses didapatkan dari IKPA Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan.

Realisasi IKU dihitung menggunakan bobot tertimbang dari indikator yang tersedia pada triwulan tersebut.

Adapun penjelasan sebagai berikut:
Pada triwulan I tahun 2019, indikator Capaian Keluaran, Efisiensi, Pagu Minus, dan Dispensasi SPM belum ada. Indikator ini tidak diikutkan dalam perhitungan IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Indikator	Bobot	Periode Pelaporan	Cascade		Trajectory			
			Kasatker	Non-Satker	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1. Capaian Keluaran (SMART DJA)	30%	Tahunan	√	√	-	-	-	√
2. Efisiensi (Modifikasi *on* SMART DJA)	15%	Tahunan	√	√	-	-	-	√
3. Konsistensi (Modifikasi SMART DJA dan IKPA)	10%	Triwulanan	√	√	√	√	√	√
4. Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto (*based* SE-35/2017)	15%	Triwulanan	√	√	√	√	√	√
5. Penyelesaian Tagihan (*based* IKPA)	4%	Triwulanan	√	√	√	√	√	√
6. Data Kontrak (*based* IKPA)	3%	Triwulanan	√	√	√	√	√	√
7. Pengelolaan UP (*based* IKPA)	4%	Triwulanan	√	-	√	√	√	√
8. Perencanaan Kas (*based* IKPA)	2%	Triwulanan	√	-	√	√	√	√
9. Penyampaian LPJ (*based* IKPA)	2%	Triwulanan	√	-	√	√	√	√
10. Pengembalian SPM (*based* IKPA)	3%	Triwulanan	√	-	√	√	√	√
11. Retur SP2D (*based* IKPA)	3%	Triwulanan	√	-	√	√	√	√
12. Revisi DIPA (*based* IKPA)	5%	Triwulanan	√	√	√	√	√	√
13. Pagu Minus (*based* IKPA)	2%	Tahunan	√	-	-	-	-	√
14. Dispensasi SPM (*based* IKPA)	2%	Tahunan	√	-	-	-	-	√
Jumlah	100%	100%			95%	95%	95%	95%

Tujuan:

Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi penyerapan atas capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, penyampaian LPJ, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM.

Satuan Pengukuran : **Persentase**

Jenis Aspek Target pada SKP : **(X) Kuantitas** ( ) Kualitas/Mutu ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU : ( ) High **(X) Moderate** ( ) Low

Tingkat Validitas IKU : ( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Subdit PTTI

Unit/Pihak Penyedia Data : Subdit PTTI

Sumber Data : Laporan realisasi anggaran Dit. SITP, TOR, RKA-K/L, LTPK, IKPA DJPB, OMSPAN, dan SMART DJA.

Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta **(X) Non-Cascading**

Metode Cascading : ( ) Direct (X) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum **(X) Average** ( ) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( ) Average **(X) Raw data**

Polarisasi Indikator Kinerja : **(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan **(X) Triwulanan** ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Konversi 120 : ( ) Ya **(X) Tidak**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	12%	30.89%	95%	90,93%	12%
Triwulan II	29%	51.53%	95%	76,58%	29%
Triwulan III	60%	69.33%	95%	83,75%	60%
Triwulan IV	95%	97.33%	95%	99,61%	95%
Tahunan	**95%**	97.33%	95%	89,68%	95%